

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(P-RENJA PD)
TAHUN 2022**

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Prof. HM Yamin, SH No. 41AA Medan
Telp. (061) 4524550 – 4535320
20234
Email : dinkes@sumutprov.go.id



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ini dapat disusun. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ini selanjutnya menjadi pedoman dan rujukan dalam perencanaan, prioritas program/kegiatan/sub kegiatan serta pelaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ini disusun dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja PD ini merupakan upaya untuk memenuhi maksud dari Peraturan Menteri Dalam Negeri di atas dan juga sebagai pemenuhan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, yang dalam penyusunannya memerhatikan keselarasan dengan program prioritas nasional tahun 2022, prioritas daerah, serta analisis terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2022 keadaan Triwulan II.

Kami sangat mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dan membantu penyusunan Perubahan Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ini. Semoga seluruh daya dan upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan rahmat, hidayah, dan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara,



drg. ISMAIL LUBIS, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19710204 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 Sampai Dengan Triwulan II 7

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD..... 11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 21

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 24

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 25

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 26

BAB IV PENUTUP 36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2022 Keadaan Triwulan II
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2022 Keadaan Triwulan II
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2022 Keadaan Triwulan II
Tabel 2.4	Pergeseran/Perubahan Anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 per Program
Tabel 2.5	Pergeseran/Perubahan Anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 per Jenis Belanja
Tabel 2.6	Jumlah Alokasi, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran per Program APBD Tahun Anggaran 2022 Keadaan Triwulan II
Tabel 2.7	Jumlah Alokasi, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran per Jenis Belanja APBD Tahun Anggaran 2022 Keadaan Triwulan II
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2022
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2022
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2022
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman Tahun 2022
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2022
Tabel 3.1	Rekapitulasi Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

BAB I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu dilaksanakan pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pemenuhan hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan menuju masyarakat mandiri untuk hidup sehat.

Berbagai upaya pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan mendapatkan tantangan, baik secara lokal, nasional, maupun global, sebagai akibat dari perubahan sosial ekonomi serta perubahan lingkungan strategis. Berbagai masalah dan tantangan dalam pembangunan kesehatan telah berkembang semakin berat dan kompleks dan kadang-kadang tidak terduga. Semakin dirasakan bahwa pembangunan kesehatan tidak dapat mencapai tujuannya bila hanya diselenggarakan oleh sektor kesehatan saja. Keikutsertaan pihak lain (*stakeholders*) secara lintas sektor termasuk swasta dan masyarakat serta seluruh potensi bangsa sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara 2005–2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2019–2023 dan perubahannya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2019–2023 dan perubahannya, serta memperhatikan arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dalam rangka memenuhi tanggung jawab penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan UUD 1945 pasal 34 dan pencapaian sasaran pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.

Perubahan Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 adalah dokumen rencana 1 (satu) tahun. Penyusunan dokumen Perubahan Renja PD adalah amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2)), yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Perubahan Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 memuat rancangan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perubahan Renja PD ini dirumuskan dengan melakukan telaahan terhadap kebijakan kesehatan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024.

1.2 Landasan Hukum

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435);
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 14 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

- 18 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1447);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- 21 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
- 22 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
- 23 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 6);
- 24 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
- 25 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
- 26 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
- 27 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39);
- 28 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
- 29 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2022 dimaksudkan untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan arah pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, serta menjadi dasar bagi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022.

b. Tujuan

1. Tersusunnya rencana program/kegiatan/sub kegiatan prioritas pembangunan Kesehatan Sumatera Utara tahun 2022 yang selaras dengan program/kegiatan/ sub kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022.
2. Terwujudnya program dan kegiatan pembangunan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat urgensinya.
3. Terwujudnya pola perencanaan yang konsisten, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi hasil program/kegiatan/sub kegiatan.
4. Terselenggaranya pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan kesehatan Tahun 2022 secara terarah dan terukur dengan menggunakan sumber daya yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2022 terdiri dari 4 (empat) Bab, di mana masing-masing Bab memuat beberapa Subbab sebagai berikut:

Bab 1 adalah Pendahuluan, memuat *Latar Belakang* yang menjelaskan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, Renja Kementerian Kesehatan dan Renja PD Kabupaten/Kota, serta keterkaitan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, *Landasan Hukum*, yang menginformasikan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD, *Maksud dan tujuan*, yang menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja PD, dan *Sistematika penulisan*, yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab 2 adalah Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan yang memuat *Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 keadaan triwulan II*,

yang berisikan informasi mengenai realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja; implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab, *Analisa Kinerja Pelayanan PD*, yang berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, *Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD*, yang menguraikan tentang sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis lainnya termasuk koordinasi dan sinergi program antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten/Kota, termasuk dengan Kementerian Kesehatan; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, program nasional/internasional seperti Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti.

Bab 3 adalah Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan PD serta sumber pembiayaannya.

Bab 4 adalah Penutup yang berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II
Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD keadaan Triwulan II tahun berjalan merupakan implementasi terhadap Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam rangka menilai capaian kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan kepada target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2022, tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan indikator kinerja Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 69.35 tahun. Tujuan Renstra ini merupakan penjabaran atas sasaran pembangunan kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Sedangkan tujuan dari pembangunan kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan indikator kinerja Indeks Kesehatan sebesar 75.70 – 76.20 poin. Indeks Kesehatan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Hasil capaian kedua indikator dimaksud (UHH dan Indeks Kesehatan) keadaan Triwulan II belum dapat disajikan karena baru akan diperoleh setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Gambaran kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 keadaan Triwulan II secara detail dapat dilihat melalui perbandingan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan realisasinya, sebagai berikut:

1. *Sasaran Strategis 1* : Meningkatnya kesehatan ibu dan anak
- Terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk sasaran strategis 1, dimana keduanya mencapai target yang telah ditetapkan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2022 Keadaan Triwulan II

NO	INDIKATOR	Target	Realisasi	%
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	79,40 per 100.000 kelahiran hidup	12,21 per 100.000 kelahiran hidup	-
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	2,32 per 1.000 kelahiran hidup	0,63 per 1.000 kelahiran hidup	-

2. *Sasaran Strategis 2* : Meningkatnya status gizi masyarakat
- Terdapat 1 (satu) indikator kinerja untuk sasaran strategis 2, dan telah mencapai target yang telah ditetapkan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2022 Keadaan Triwulan II

No.	INDIKATOR	Target	Realisasi	%
1	Prevalensi stunting pada balita	27,50%	NA	-

3. *Sasaran Strategis 3* : Menurunnya angka kesakitan.
- Terdapat 1 (satu) indikator kinerja untuk sasaran strategis 3, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2022 Keadaan Triwulan II

No.	INDIKATOR	Target	Realisasi	%
1	Angka kesakitan (morbiditas)	12,22%	NA	-

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.820.233.235,00 dari target sebesar Rp. 5.355.524.000,00 atau sebesar 33,99%. PAD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 bersumber *retribusi jasa umum*, yaitu retribusi pelayanan kesehatan, *retribusi jasa usaha* yang meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah (rumah dinas), serta *retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa/mess*. Rendahnya realisasi PAD sampai dengan keadaan Triwulan II disebabkan masih adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang melanda dunia dan Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara, sehingga membatasi akses masyarakat ke fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dan kunjungan pasien ke UPT-UPT Dinas Kesehatan. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan diambilnya kebijakan pembatasan mobilitas dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan pengumpulan massa (kerumunan) oleh Pemerintah Daerah, sehingga retribusi pada UPT. Pelatihan Kesehatan yang bersumber dari kegiatan pendidikan dan pelatihan menjadi terdampak.

Sepanjang Tahun 2022, anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bersumber APBD mengalami 4 (empat) kali pergeseran. Pada Pergeseran Kesatu, terdapat tambahan anggaran hasil pergeseran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 8.062.884.170,00 dalam rangka antisipasi lonjakan kasus COVID-19 varian OMICRON, sedangkan pada Pergeseran Kedua sampai dengan Pergeseran Keempat tidak terdapat perubahan pagu

anggaran melainkan penyempurnaan rincian belanja program/kegiatan/sub kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan. Jumlah alokasi anggaran Tahun 2022 hasil pergeseran dan Rancangan Perubahan Renja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.4

**Pergeseran/Perubahan Anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2022 per Program**

No	PROGRAM	Murni (Rp.)	Pergeseran Kesatu (Rp.)	Pergeseran Kedua (Rp.)	Pergeseran Ketiga (Rp.)	Pergeseran Keempat (Rp.)	Renja P-APBD (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	179.269.344.716	179.269.344.716	179.269.344.716	179.269.344.716	179.269.344.716	217.863.184.461
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	361.907.121.890	369.040.006.060	369.040.006.060	369.040.006.060	369.040.006.060	367.791.273.300
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	21.174.603.450	22.104.603.450	22.104.603.450	22.104.603.450	22.104.603.450	17.875.785.450
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	442.574.500	442.574.500	442.574.500	442.574.500	442.574.500	442.574.500
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.694.297.500	1.694.297.500	1.694.297.500	1.694.297.500	1.694.297.500	2.372.545.115
T O T A L		564.487.942.056	572.550.826.226	572.550.826.226	572.550.826.226	572.550.826.226	606.345.362.826

Tabel. 2.5

**Pergeseran/Perubahan Anggaran APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2022 per Jenis Belanja**

No	PROGRAM	Murni (Rp.)	Pergeseran Kesatu (Rp.)	Pergeseran Kedua (Rp.)	Pergeseran Ketiga (Rp.)	Pergeseran Keempat (Rp.)	Renja P-APBD (Rp.)
1	Belanja Operasi	551.804.051.294	559.866.935.464	559.866.935.464	557.467.072.944	557.467.072.944	589.915.937.882
1.1	Belanja Pegawai	129.020.238.000	129.020.238.000	129.020.238.000	129.020.238.000	129.020.238.000	162.511.753.000
1.2	Belanja Barang dan Jasa	417.993.813.294	426.056.697.464	426.056.697.464	421.463.087.842	421.463.087.842	420.608.935.980
1.3	Belanja Hibah	4.790.000.000	4.790.000.000	4.790.000.000	6.983.747.102	6.983.747.102	6.795.248.902
2	Belanja Modal	12.683.890.762	12.683.890.762	12.683.890.762	15.083.753.282	15.083.753.282	16.429.424.944
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.421.635.762	9.421.635.762	9.421.635.762	11.821.498.282	11.821.498.282	13.317.169.944
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.814.255.000	2.814.255.000	2.814.255.000	2.814.255.000	2.814.255.000	2.814.255.000
2.3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	448.000.000	448.000.000	448.000.000	448.000.000	448.000.000	298.000.000
T O T A L		564.487.942.056	572.550.826.226	572.550.826.226	572.550.826.226	572.550.826.226	606.345.362.826

.....

Realisasi belanja daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 keadaan Triwulan II sebesar Rp. 231.575.380.639,00 (40,48%), terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 230.720.785.439,00 dari total Belanja Operasi sebesar Rp. 551.804.051.294,00 (41,21%), dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.036.595.200,00 dari total Belanja Modal sebesar Rp. 12.683.890.762,00 (8,17%). Bila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2021 keadaan Triwulan II yaitu sebesar 30,25 persen, maka realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 keadaan Triwulan II menunjukkan peningkatan kinerja.

Realisasi Belanja Operasi terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 75.904.839.215,00 dari total Belanja Pegawai sebesar Rp. 129.020.238.000,00 (58,83%), realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 154.115.946.224,00 dari total Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 417.993.813.294,00 (36,17%), dan realisasi Belanja Hibah sebesar Rp. 700.000.000,00 dari total Belanja Hibah sebesar Rp. 4.790.000.000,00 (14,61%). Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 keadaan Triwulan II yaitu sebesar 30,51 persen, maka realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 keadaan Triwulan II menunjukkan peningkatan kinerja.

Realisasi Belanja Modal terdiri dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 988.732.050,00 dari total Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 9.421.635.762,00 (10,49%), dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 47.863.200,00 dari total Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 448.000.000,00 (10,68%). Meski Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 2.814.255.000,00 belum terealisasi, namun bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 keadaan Triwulan II yaitu sebesar 3,31 persen, maka realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 keadaan Triwulan II menunjukkan peningkatan kinerja.

Tabel. 2.6

Jumlah Alokasi, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran per Jenis Belanja
APBD Tahun Anggaran 2022 Keadaan Triwulan II

No.	PROGRAM	Alokasi (Rp.) Keadaan Pergeseran Kedua	Realisasi (Rp.)	(%)
1	Belanja Operasi	559.866.935.464	230.720.785.439	41.21
1.1	Belanja Pegawai	129.020.238.000	75.904.839.215	58.83
1.2	Belanja Barang dan Jasa	426.056.697.464	154.115.946.224	36.17
1.3	Belanja Hibah	4.790.000.000	700.000.000	14.61
2	Belanja Modal	12.683.890.762	1.036.595.200	8.17
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.421.635.762	988.732.050	10.49
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.814.255.000	0	0.00
2.3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	448.000.000	47.863.200	10.68
T O T A L		572.550.826.226	231.575.380.639	40.48

Sampai dengan keadaan Triwulan II Tahun Anggaran 2022, persentase realisasi belanja terbesar ada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu 49.39 persen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 88.532.314.597,00, diikuti Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar 40,67 persen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.989.736.157,00, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar 36.33 persen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 134.069.487.985,00, dan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman sebesar 32.02 persen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 141.700.900,00. Realisasi terendah ada pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yaitu sebesar 1.42 persen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.141.000,00.

Tabel. 2.7

Jumlah Alokasi, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran per Program
APBD Tahun Anggaran 2022 Keadaan Triwulan II

No.	PROGRAM	Alokasi (Rp.) Keadaan Pergeseran Kedua	Realisasi (Rp.)	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	179.269.344.716	88.532.314.597	49.39
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	369.040.006.060	134.069.487.985	36.33
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	22.104.603.450	8.989.736.157	40.67
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	442.574.500	141.700.900	32.02
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.694.297.500	24.141.000	1.42
T O T A L		572.550.826.226	231.757.380.639	40.48

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara harus dipandang memiliki hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal, tanpa diskriminasi.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 1,77 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,15 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Sumatera Utara sebesar 67,46 tahun, dan pada tahun 2021 telah mencapai 69,23 tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan capaian umur Harapan Hidup jika dibandingkan dengan UHH Tahun 2020 yakni 69,10 tahun. Bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan yakni 69,22 tahun maka UHH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sudah mencapai target. Peningkatan Umur Harapan Hidup penduduk Sumatera Utara dari tahun ke tahun dapat dilihat sebagai berikut : 69,23 tahun pada tahun 2021; 69,10 tahun pada tahun 2020; 68,95 tahun pada tahun 2019; 68,61 tahun pada tahun 2018; 68,37 tahun pada tahun 2017; 68,29 tahun pada tahun 2015; 68,04 tahun pada tahun 2014 dan 67,46 tahun pada tahun 2010.

Kasus Kematian Ibu menggambarkan status kesehatan/gizi ibu selama hamil yang rendah, kondisi wanita pada umumnya, kondisi lingkungan dan masih belum memadainya tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, melahirkan dan menyusui. Kematian ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera. Untuk mendapatkan data Angka Kematian Ibu harus dilakukan melalui survei, baik yang dilakukan oleh BPS maupun lembaga-lembaga survei yang sudah diakui baik secara nasional maupun internasional. Namun karena ketiadaan survey maka data yang diperoleh adalah berdasarkan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan Laporan dari Kabupaten/Kota, yakni dari jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran hidup (sasaran ibu hamil) dikali 100.000 Kelahiran Hidup. Dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2021 jumlah kasus kematian ibu adalah sebanyak 236 kasus dari 278.100 sasaran lahir hidup, sehingga AKI Tahun 2021 adalah sebesar 84,86 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka ini menunjukkan terjadinya peningkatan AKI yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 187 kasus dari 299.198 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2020 adalah

.....

sebesar 62,50 per 100.000 KH). Tahun 2019 yaitu 202 kasus dari 302.555 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2019 adalah sebesar 66,76 per 100.000 KH), tahun 2018 yaitu 186 kasus dari 305.935 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2018 yakni 60,80 per 100.000 KH) dan tahun 2017 yaitu 180 kasus dari 300.358 sasaran lahir hidup (AKI Tahun 2017 yakni 59,36 per 100.000 KH). Peningkatan kasus kematian ibu disebabkan oleh beberapa hal yakni akibat pandemi Covid -19 banyak ibu hamil yang takut memeriksakan kehamilannya ke fasilitas pelayanan Kesehatan sehingga cakupan pelayanan Kesehatan ibu dan anak menurun tajam dibandingkan sebelum pandemi. Namun apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu 93,49 per 100.000 Kelahiran Hidup maka Angka Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sudah mencapai target. Untuk tahun 2022 dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak, sampai triwulan II telah dilaporkan kasus kematian ibu sebanyak 34 kasus dari 278.350 sasaran lahir hidup sehingga Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah 12,21 per 100.000 Kelahiran Hidup.

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Sama seperti Angka Kematian Ibu (AKI), untuk mendapatkan data Angka Kematian Bayi harus dilakukan melalui survei, baik yang dilakukan oleh BPS maupun lembaga-lembaga survei yang sudah diakui baik secara nasional maupun internasional. Namun karena ketiadaan survei maka data yang diperoleh adalah berdasarkan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan Laporan dari Kabupaten/Kota, yakni dari jumlah kematian bayi dibagi sasaran lahir hidup dikali 1.000 Kelahiran Hidup. Dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2021 jumlah kasus kematian bayi adalah sebanyak 588 kasus dari 278.100 sasaran lahir hidup sehingga AKB Tahun 2021 adalah sebesar 2,11 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka ini menunjukkan penurunan AKB jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 715 kasus dari 299.198 sasaran lahir hidup sehingga AKB Tahun 2020 adalah sebesar 2,39 per 1.000 KH, tahun 2019 yaitu 790 kasus dari 302.555 sasaran lahir hidup (AKB tahun 2019 yakni 2,61 per 1.000 KH), tahun 2018 yaitu 869 kasus dari 305.935 sasaran lahir hidup (AKB tahun 2018 yakni 2,84 per 1.000 KH); dan tahun 2017 yaitu 1.066 kasus dari 300.358 sasaran lahir hidup (AKB tahun 2017 yakni 3,52 per 1.000 KH). Dengan demikian Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

.....

yakni 2,11 per 1.000 KH menunjukkan penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2019 sebesar 2,61 per 1.000 KH, tahun 2018 sebesar 2,84 per 1.000 KH dan tahun 2017 sebesar 3,52 per 1.000 Kelahiran Hidup. Dan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu 2,44 per 1.000 Kelahiran Hidup maka Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sudah melampaui target. Untuk tahun 2022 dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak, sampai triwulan II telah dilaporkan kasus kematian bayi sebanyak 174 kasus dari 278.350 sasaran lahir hidup sehingga Angka Kematian Bayi (Bayi) Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah 0,63 per 1.000 Kelahiran Hidup.

Status gizi berkontribusi terhadap kondisi *sehat-sakit* karena dapat memengaruhi kekebalan tubuh, kerentanan terhadap penyakit serta pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Gizi yang baik akan menurunkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu masalah gizi yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara adalah *stunting*, yaitu kondisi yang mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekuarangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas seseorang di masa depan. Kejadian *stunting* merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di Indonesia dan prevalensinya cenderung statis. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2007 menunjukkan prevalensi balita *stunting* di Indonesia sebesar 36,8%. Pada tahun 2010, terjadi sedikit penurunan menjadi 35,6%, namun prevalensi balita *stunting* kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 37,2% dan hasil Riskesdas Tahun 2018 menunjukkan terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi 30,8%. Untuk Provinsi Sumatera Utara, dari hasil Riskesdas Tahun 2018 diperoleh data prevalensi *stunting* pada balita sebesar 32,3%, angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2013 dimana prevalensi *stunting* pada balita di Sumatera Utara Tahun 2013 adalah 42,5%. Meskipun terjadi penurunan yang signifikan, namun Prevalensi *Stunting* pada Balita di Sumatera Utara tahun 2018 masih berada di atas angka nasional yaitu 30,8% dan masih jauh dari besar prevalensi yang disarankan WHO (dibawah 20%). Pada tahun 2021 hasil survey Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) diperoleh Prevalensi *Stunting* pada Balita di Sumatera Utara sebesar 25,8%. Angka ini menunjukkan adanya penurunan prevalensi *stunting* jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 29,20%, tahun 2019 sebesar 30,7% dan tahun 2018 sebesar 32,3% dan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu 28,50%, maka Prevalensi *Stunting* pada Balita

.....

di Sumatera Utara sudah mencapai target. Untuk menghitung prevalensi stunting pada balita, tahun 2022 akan dilaksanakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh Kementerian Kesehatan. SSGI adalah bagian dari sistem manajemen pembangunan nasional bidang kesehatan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), data stunting harus tersedia setiap tahun sebagai bahan evaluasi, bahan perbaikan kinerja, bahan penyempurnaan program dan kegiatan, sekaligus bahan penentu kebijakan pada tahun berikutnya.

Angka kesakitan (*morbidity*) merupakan indikator penting yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Seperti halnya negara-negara lain di dunia, Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi Covid – 19 yang sangat berdampak terhadap status kesehatan masyarakat. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Bidang Kesehatan Tahun 2021, Angka Kesakitan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah sebesar 8,78%, jika dibandingkan dengan angka nasional yaitu 13,04 % maka Sumatera Utara masih jauh dibawah angka nasional dan Provinsi Sumatera Utara merupakan nomor 7 dengan angka kesakitan terendah se-Indonesia. Angka kesakitan tahun 2021 ini juga menunjukkan penurunan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai 12,24 %, tahun 2019 sebesar 11,97%, tahun 2018 sebesar 11,03 %, tahun 2017 sebesar 11,17%, tahun 2016 sebesar 11,15 % dan tahun 2015 sebesar 11,84%. Dan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu 12,24 %, maka Angka Kesakitan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sudah jauh melampaui target.

Sampai dengan keadaan 31 Juli 2022, terdapat 155.994 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara, meningkat 25 kasus dibanding hari sebelumnya. Jumlah kasus yang telah memiliki hasil akhir (*outcome*) sebanyak 155.509 kasus, dimana 152.245 diantaranya dinyatakan sembuh (bertambah 19 orang dari hari sebelumnya) (*Recovery Rate/RR* sebesar 97,6%), dan 3.264 lainnya dinyatakan meninggal dunia (bertambah 0 orang dari hari sebelumnya) (*Case Fatality Rate/CFR* sebesar 2.1%). Terdapat 485 orang terkonfirmasi positif (0,3%) yang sedang dirawat di RS atau sedang menjalani isolasi mandiri. Sampai dengan pertengahan tahun 2022, kasus harian tertinggi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara tercatat pada tanggal 23 Februari 2022 sebanyak 2.898 kasus. Rata-rata 38,5 kasus konfirmasi positif COVID-19 bertambah setiap harinya di Provinsi Sumatera Utara dalam 14 (empat belas) hari terakhir. Jumlah spesimen yang diperiksa

diketahui sebanyak 3.726.482 spesimen (Antigen+PCR), bertambah 2.510 spesimen dibanding hari sebelumnya dan memberikan angka *positivity rate* harian sebesar 1,0%. *Positivity rate* adalah rasio antara jumlah kasus positif dengan total tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) yang dilaksanakan, dimana semakin tinggi rasionya maka semakin tinggi pula kemungkinan kasus COVID-19 yang belum terdeteksi. Secara keseluruhan, situasi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara lebih baik dibandingkan dengan situasi COVID-19 Nasional, ditandai dengan *RR* yang lebih tinggi (Nasional 96,7%), dan *CFR* (Nasional 2,5%), *positivity rate* (Nasional 5,6%), dan persentase kasus aktif (Nasional 0,8%) yang lebih rendah.

Selanjutnya, untuk mempermudah pemahaman akan pencapaian kinerja Program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, maka penjelasan tentang realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi, memenuhi dan melebihi target capaian indikator kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan akan diuraikan program per program.

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Outcome yang harus dicapai oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai dengan Renja tahun 2022 dan sampai keadaan triwulan II tahun 2022, sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Tahun 2022

No	Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Triw. II 2022
1	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	A	-
2	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%	50%

1.2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Program Kesehatan Masyarakat

Terdapat 85 (delapan puluh empat) Indikator Kinerja yang harus dicapai oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Program Kesehatan Masyarakat sesuai Renja tahun 2022 dan sampai triwulan II tahun 2022, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9

Capaian Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2022

No	Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Triw. II 2022
1	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	65%	57,72%
2	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Keperawatan kesehatan Masyarakat (Perkesmas) dengan Pendekatan Keluarga	50%	31,79%
3	Persentase FKTP yang Menyelenggarakan Kesehatan Tradisional	45%	42%
4	Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di DTPK	55%	35%
5	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rawat Inap yang Menerapkan Pelayanan Kegawatdaruratan	100%	100%
6	Persentase Fasyankes yang Memenuhi Standar Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	80%	65%
7	Persentase FKTP yang terakreditasi	91,7%	90,73%
8	Persentase Rumah Sakit Pemerintah Non BUMN/TNI/POLRI yang Terakreditasi	88,4%	85,71%
9	Persentase Laboratorium Kesehatan yang terakreditasi	21,7%	10,87%
10	Persentase Rumah Sakit yang Menerapkan Standarisasi Klasifikasi sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	78,7%	72,99%
11	Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	95%	90,95%
12	Persentase RSUD yang Menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 Jam	98%	91,8%
13	Persentase RSUD Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	76%	69,2%
14	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat di RSUD sesuai Standar	98%	97,5%
15	Cakupan Pelaksanaan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Kab/ Kota	61%	0
16	Persentase Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan sesuai Standar di Rumah Sakit Khusus Mata	90%	-
17	Persentase Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan sesuai Standar di Rumah Sakit Khusus Paru	90%	-
18	Persentase Kesembuhan pasien Kusta di UPT.RS Kusta Lausimomo	85%	-
19	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan sesuai Standar di UPT .Laboratorium Kesehatan	84%	-
20	Persentase Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan sesuai Standar di Rumah Sakit Indrapura	90%	-
21	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	1.6	-

No	Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Triw. II 2022
22	Prevalensi Stunting (Pendek) dan Sangat Pendek pada balita	27,5%	6,5%
23	Prevalensi Wasting (Gizi kurang dan Gizi Buruk) pada balita	6,4%	2,6%
24	Cakupan Bayi Kurang 6 Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif	55%	46,6%
25	Persentase kabupaten/kota melakukan surveilans gizi	40%	30,3%
26	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	10%	6,3%
27	Persentase ibu hamil mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	70%	51,89%
28	Persentase Puskesmas mampu Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita	15%	10%
29	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat MP-ASI	70%	-
30	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	26,63%
31	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	27,99%
32	Cakupan pelayanan nifas sesuai standar	85%	18,39%
33	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	25,76%
34	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	100%	17,53%
35	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	-
36	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	23,87%
37	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	70%	65%
38	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja	80%	70%
39	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	70%	66,48%
40	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang Dilakukan Pengawasan	45%	43,1%
41	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Dilakukan Pengawasan	40%	43,52%
42	Persentase Fasyankes Melaksanakan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar	60%	15,21%
43	Jumlah Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat	13 kab/kota	12%
44	Persentase Sarana Air Minum yang Dilakukan Pengawasan/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	70%	72,9%
45	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12-23 bulan	71%	-
46	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	94,1%	23,2%

No	Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Triw. II 2022
47	Jumlah kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	29 K/K	-
48	Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapatkan Imunisasi lanjutan Campak Rubella	85,6%	18,6%
49	Persentase anak sekolah dasar yang mendapatkan Imunisasi lanjutan Difteri Tetanus (DT)	90%	-
50	Angka Non Polio Acute Flacyd Paralysis (AFP) per 100.000 anak usia <15 tahun	≥2	-
51	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi	100%	100%
52	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk yang terdampak Penyakit Infeksi Emerging	90%	100%
53	Persentase Kabupaten/kota yang merespon Alert SKDR minimal	70%	-
54	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100%	100%
55	Persentase Jemaah Haji yang Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	100%
56	Angka Mikrofilaria Rate (Mf rate)	< 1%	0
57	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis B	80%	66,83%
58	CFR diare pada saat KLB	<1.2%	0
59	Prevalensi kecacingan pada anak sekolah	<10%	0
60	Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	<49/100.000 pddk	16,2
61	Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk (API)	0,1	0,09 per 1000 pddk
62	Angka Case Detection Rate penyakit TB	45%	17,5%
63	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate)	90%	90,1%
64	Prevalensi HIV-AIDS	<0.5%	0,26%
65	Angka zoonosis lainnya (Flu burung, rabies, antraks, leptopirosis) yang ditangani sesuai standar	80%	83 %
66	Cakupan penemuan dan tata laksana kasus pneumonia pada balita	55%	72,05%
67	Angka penemuan kasus baru frambusia Per 100.000 penduduk	<0.10	0
68	Angka penemuan kasus baru kusta per 100.000 penduduk	≤ 5	0,27
69	Angka Cacat Kusta tingkat 2	<20%	15,5%
70	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Paling Kurang 40% Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	24 Kab/Kota	23 Kab/Kota
71	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki paling kurang 80% Puskesmas melakukan pelayanan terpadu PTM sesuai standar	20 Kab/Kota	21 Kab/Kota
72	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	0,98%

No	Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Triw. II 2022
73	Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	4,18%
74	Jumlah Kab/kota yang memiliki cakupan deteksi dini faktor risiko penyakit Tidak Menular paling kurang 80%	10 kab/kota	0
75	Jumlah kab/kota yang memiliki paling kurang 80% Puskesmas melakukan deteksi dini penyakit kanker	23 Kab/Kota	14 Kab/Kota
76	Jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera > 40% populasi	5 Kab/Kota	1 Kab/Kota
77	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%	65,30%
78	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan napza di 30 % SMA/ sederajat	24 Kab/Kota	22 Kab/Kota
79	Jumlah Kab/Kota yang memiliki 30 % Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sesuai standar	24 Kab/Kota	22 Kab/Kota
80	Persentase pecandu ,Penyalahguna Napza yang Menjalani Program Rehabilitasi di Fasyankes	1,3%	1,20%
81	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	78,3 %	69,26%
82	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensia	95%	90,10%
83	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	68%	-
84	Persentase kab/kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100%	100%

1.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja yang harus dicapai oleh **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** sesuai dengan Renja tahun 2022, Keadaan sampai triwulan II tahun 2022, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10

Capaian Kinerja Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2022

No	Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Triw. II 2022
1	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (Sembilan) jenis tenaga Kesehatan	43%	34,04%
2	Persentase Tenaga Kesehatan yang Dilatih pada Pelatihan Terakreditasi	2%	0,49%
3	Persentase Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya	20%	11,21%
4	Persentase Rumah Sakit yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	45%	72%

1.4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Makanan Minuman

Dari 6 (enam) indikator kinerja yang harus dicapai oleh **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman** sampai triwulan II tahun 2022, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11

Capaian Kinerja Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman Tahun 2022

No	Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Triw. II 2022
1	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan Perizinan	90%	83,33%
2	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha	100%	87,50%
3	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang menerapkan CPAKB, CPPKRTB dan CDAKB	87%	85%
4	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian	58%	29,42%
5	Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas	67%	65,62
6	Persentase sarana produksi kefarmasian yang dibina agar memenuhi standar cara produksi yang baik	73%	83,33%

1.5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang harus dicapai oleh **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** sesuai dengan Renja tahun 2022 dan Sampai triwulan II tahun 2022, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12

Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2022

No	Indikator	Target Tahun 2022	Capaian Triw. II 2022
1	Persentase kab/kota yang melaksanakan Germas	70%	75%
2	Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif	45%	58,88%
3	Persentase Posyandu Aktif	58%	57,14%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tahun 2022 adalah tahun keempat RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019–2023 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2019–2023. Pada Pemilukada yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018, terdapat Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah yang telah dilantik pada tanggal 5 September 2018 dengan visi ‘**Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat**’. Adapun misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

- (1) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- (2) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat disertai harmonis.
- (3) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- (4) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia.
- (5) Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah dan berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab.

Program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2022 ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023 dan perubahannya, khususnya dalam upaya mencapai misi ke-1, yaitu *bermartabat dalam kehidupan karena memiliki kesehatan yang prima*, yang diselaraskan dengan arah kebijakan, Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas pembangunan kesehatan nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa Provinsi memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan SPM kesehatan yang terdiri dari (a) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan (b) pelayanan

kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Kedua indikator SPM Provinsi tersebut telah diintegrasikan dalam Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2022 dan telah disesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan. Berdasarkan evaluasi hasil capaian pembangunan kesehatan, diketahui bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara masih belum menggembirakan. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya capaian sasaran strategis, masih lemahnya mekanisme koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan sinkronisasi/integrasi perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pembangunan kesehatan, serta politik anggaran yang belum menjadikan pembangunan sektor kesehatan sebagai isu penting dalam pembangunan Sumatera Utara, yang dibuktikan dengan masih rendahnya alokasi anggaran kesehatan bila dibandingkan dengan tuntutan Undang-Undang yang berlaku (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 171 ayat 2).

Lebih lanjut, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dihadapkan pada beban multi penyakit (*triple burden of diseases*) serta meningkatnya populasi penduduk usia lanjut. Beban multi penyakit ditandai dengan perubahan pola penyakit penyebab kematian dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (transisi epidemiologi), disertai dengan munculnya penyakit-penyakit baru (*emerging diseases*) seperti pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Pertambahan populasi penduduk usia lanjut (sebagai konsekuensi meningkatnya umur harapan hidup waktu lahir dan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan) juga dapat berimplikasi pada sistem kesehatan. Situasi tersebut berdampak pada perubahan kebutuhan jenis tenaga kesehatan, tuntutan akan pelayanan kesehatan yang lebih maju, serta kebutuhan biaya kesehatan yang lebih besar. Tantangan lain yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah bagaimana mereduksi disparitas status kesehatan masyarakat antar wilayah termasuk dalam hal disparitas pembiayaan kesehatan, persebaran tenaga kesehatan, dan ketersediaan sarana dan teknologi kedokteran dalam mewujudkan keadilan (*equity*) dan pemerataan (*equality*) pembangunan kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga dihadapkan pada semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan ketersediaan fasilitas kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Pelayanan kesehatan diharapkan menjangkau populasi yang belum/tidak terjangkau serta melayani masyarakat yang tidak terlayani, termasuk mereka yang rentan (*vulnerable groups*). Regionalisasi RS dan sistem rujukan terintegrasi yang diharapkan menjadi solusi

.....

bagi kompleksitas pelayanan rujukan di Sumatera Utara, dalam implementasinya belum memberikan hasil yang memuaskan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar serta dalam menciptakan kepuasan konsumen kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Pemerintah juga dihadapkan pada pencapaian target indikator-indikator yang dituangkan dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), yang merupakan agenda pembangunan Pasca MDGs 2015. Di sisi lain, Pasar Bebas Asean (*Asean free trade*) dan Masyarakat Ekonomi Asean (*Asean Economic Community*) telah pula berlaku.

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, asuransi kesehatan yang sebelumnya dikelola oleh beberapa lembaga menjadi terintegrasi pada satu badan, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang telah beroperasi mulai 1 Januari 2014 melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sampai dengan April tahun 2020, capaian persentase penduduk yang telah terjamin pemeliharaan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 72,43%, masih jauh dari target minimal cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage/UHC*) yaitu sebesar 95%. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di luar Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam mengikuti program JKN/KIS mandiri, serta adanya kenaikan iur premi PBI yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga membebani pembiayaan jaminan kesehatan yang telah dianggarkan. Perlu kerja keras dan kerja sama semua pihak dalam upaya meningkatkan capaian JKN/KIS dimaksud.

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang melanda dunia juga memberikan dampak yang signifikan bagi negara Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di samping berdampak pada sektor kesehatan yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan angka kematian (*infection fatality rate*), COVID-19 juga memberikan dampak kepada sektor perekonomian yang berakibat pada rendahnya potensi penerimaan negara dan daerah. Rendahnya potensi penerimaan daerah selanjutnya berkontribusi pada rendahnya belanja daerah, sehingga membutuhkan restrukturisasi program/kegiatan dan prioritas belanja kesehatan.

Terdapat 8 (delapan) prioritas pembangunan dalam Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, yaitu (1) Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses Pendidikan dengan 11 Kegiatan Strategis Daerah (KSD), (2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan 7 KSD, (3) Peningkatan kesempatan kerja berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan

.....

dengan 4 KSD, (4) Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dengan 5 KSD, (5) Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata dengan 6 KSD, (6) Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan 3 KSD, (7) Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga dengan 10 KSD, dan (8) Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan dengan 8 KSD.

Program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 disusun dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan **peningkatan derajat kesehatan masyarakat** dengan menekankan pada strategi utama *Membangun Desa Menata Kota*. Seluruh program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 telah memedomani nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Terdapat 7 KSD pada prioritas pembangunan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yaitu: (1) Penanganan COVID-19 melalui penguatan Pola 3T (*testing, tracing, dan treatment*), percepatan vaksinasi, penyediaan obat-obatan, penguatan kapasitas Rumah Sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis, (2) Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Sakit Haji Medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat, (3) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi *stunting*, (4) Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (serratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada RS Jiwa Prof. M. Ildrem, (5) Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 kabupaten/kota, (6) Pemberian jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 jiwa, dan (8) Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 merupakan penyempurnaan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang terdapat pada RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022. Program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2022 disusun dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan Ke-empat, yaitu **Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas**

dengan menekankan pada strategi utama *Membangun Desa Menata Kota*. Seluruh program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 telah memedomani nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

BAB III
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia dan Indonesia, maka pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Utara masih diarahkan pada upaya penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara berupaya adaptif terhadap dinamika dan perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara, dengan melakukan pergeseran anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan belanja yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 dan dukungan vaksinasi COVID-19.

Sepanjang tahun 2022, anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara bersumber APBD mengalami 4 (empat) kali pergeseran. Pada Pergeseran Kesatu, terdapat tambahan anggaran hasil pergeseran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 8.062.884.170,00 dalam rangka antisipasi lonjakan kasus COVID-19 varian OMICRON yang diperuntukkan bagi penyiapan Isolasi Terpusat (ISOTER) pasien COVID-19 dengan gejala ringan pada Asrama Haji Medan dan RSUD Haji Medan, disamping penyediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) penanganan COVID-19. Pergeseran Kedua dilakukan dalam rangka penyempurnaan rincian belanja program/kegiatan/sub kegiatan serta pergeseran belanja gaji dan tunjangan untuk mengakomodir TPP dan THR pegawai. Pergeseran Ketiga dilakukan dalam rangka dukungan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung mesin *Whole Genome Sequencing* (WGS) COVID-19 dan dukungan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Pergeseran Keempat dilakukan dalam rangka penyesuaian belanja TPP menyusul adanya ketentuan pembayaran 50% TPP pada komponen Gaji ke-13. Jumlah alokasi anggaran Tahun 2022 hasil pergeseran dan Rancangan Perubahan Renja per program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp.)	Pagu Pergeseran 1 (Rp.)	Pagu Pergeseran 2 (Rp.)	Pagu Pergeseran 3 (Rp.)	Pagu Pergeseran 4 (Rp.)	P-RKPD (Rp.)	Ket.
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	564.487.942.056	572.550.826.226	572.550.826.226	572.550.826.226	572.550.826.226	606.345.362.826	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	179.269.344.716	179.269.344.716	179.269.344.716	179.269.344.716	179.269.344.716	217.863.184.461	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.019.047.559	1.019.047.559	1.019.047.559	1.019.047.559	1.019.047.559	1.106.887.559	

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2022
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

1.02.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	435.556.359	435.556.359	435.556.359	435.556.359	435.556.359	435.556.359	
1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	22.656.400	22.656.400	22.656.400	22.656.400	22.656.400	33.636.400	
1.02.01.1.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	22.656.400	22.656.400	22.656.400	22.656.400	22.656.400	55.596.400	
1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	17.178.800	17.178.800	17.178.800	17.178.800	17.178.800	28.158.800	
1.02.01.1.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	14.235.600	14.235.600	14.235.600	14.235.600	14.235.600	47.175.600	
1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	46.668.000	46.668.000	46.668.000	46.668.000	46.668.000	46.668.000	
1.02.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	460.096.000	460.096.000	460.096.000	460.096.000	460.096.000	460.096.000	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	129.814.201.000	129.814.201.000	129.814.201.000	129.814.201.000	136.413.240.076	163.434.376.000	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	127.007.078.000	127.007.078.000	127.007.078.000	127.007.078.000	127.007.078.000	160.600.063.000	
1.02.01.1.02.02	Penyediaan administrasi dan pelaksanaan tugas ASN	1.194.460.000	1.194.460.000	1.194.460.000	1.194.460.000	1.194.460.000	1.180.830.000	Dinas Kesehatan
1.02.01.1.02.02	Penyediaan administrasi dan pelaksanaan tugas ASN	76.680.000	76.680.000	76.680.000	76.680.000	76.680.000	62.880.000	UPT. RS Khusus Mata
1.02.01.1.02.02	Penyediaan administrasi dan pelaksanaan tugas ASN	130.680.000	130.680.000	130.680.000	130.680.000	130.680.000	100.800.000	UPT. RS Khusus Paru
1.02.01.1.02.02	Penyediaan administrasi dan pelaksanaan tugas ASN	93.780.000	93.780.000	93.780.000	93.780.000	93.780.000	93.780.000	UPT. RS Kusta Lausimomo
1.02.01.1.02.02	Penyediaan administrasi dan pelaksanaan tugas ASN	83.160.000	83.160.000	83.160.000	83.160.000	83.160.000	55.440.000	UPT. RS Indrapura
1.02.01.1.02.02	Penyediaan administrasi dan pelaksanaan tugas ASN	764.480.000	764.480.000	764.480.000	764.480.000	764.480.000	876.700.000	UPT. Laboratorium Kesehatan (termasuk pengembalian jasa medis)
1.02.01.1.02.02	Penyediaan administrasi dan pelaksanaan tugas ASN	91.920.000	91.920.000	91.920.000	91.920.000	91.920.000	91.920.000	UPT. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	64.072.000	64.072.000	64.072.000	64.072.000	64.072.000	64.072.000	
1.02.01.1.02.04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	23.930.000	23.930.000	23.930.000	23.930.000	23.930.000	23.930.000	
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	14.025.000	14.025.000	14.025.000	14.025.000	14.025.000	14.025.000	
1.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	124.186.000	124.186.000	124.186.000	124.186.000	124.186.000	124.186.000	
1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	145.750.000	145.750.000	145.750.000	145.750.000	145.750.000	145.750.000	
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	322.260.000	322.260.000	322.260.000	322.260.000	322.260.000	322.260.000	
1.02.01.1.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	3.975.000	3.975.000	3.975.000	3.975.000	3.975.000	3.975.000	
1.02.01.1.03.03	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	20.250.000	20.250.000	20.250.000	20.250.000	20.250.000	20.250.000	

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2022
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

1.02.01.1.03.04	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	34.950.000	34.950.000	34.950.000	34.950.000	34.950.000	34.950.000	
1.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	18.585.000	18.585.000	18.585.000	18.585.000	18.585.000	18.585.000	
1.02.01.1.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	244.500.000	244.500.000	244.500.000	244.500.000	244.500.000	244.500.000	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	842.697.000	842.697.000	842.697.000	842.697.000	842.697.000	1.142.697.000	
1.02.01.1.05.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	21.990.000	21.990.000	21.990.000	21.990.000	21.990.000	21.990.000	
1.02.01.1.05.04	Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	40.380.000	40.380.000	40.380.000	40.380.000	40.380.000	40.380.000	
1.02.01.1.05.05	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	45.600.000	45.600.000	45.600.000	45.600.000	45.600.000	45.600.000	
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	519.401.000	519.401.000	519.401.000	519.401.000	519.401.000	819.401.000	
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	161.506.000	161.506.000	161.506.000	161.506.000	161.506.000	161.506.000	UPT. Laboratorium Kesehatan
1.02.01.1.05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	53.820.000	53.820.000	53.820.000	53.820.000	53.820.000	53.820.000	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.456.807.427	5.456.807.427	5.456.807.427	5.456.807.427	5.456.807.427	6.780.222.152	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	85.870.318	85.870.318	85.870.318	85.870.318	85.870.318	85.870.318	Kantor Dinkes
1.02.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	55.337.240	55.337.240	55.337.240	55.337.240	55.337.240	221.768.380	UPT. RS Khusus Mata
1.02.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	49.837.260	49.837.260	49.837.260	49.837.260	49.837.260	49.837.260	UPT. RS Khusus Paru
1.02.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60.860.190	60.860.190	60.860.190	60.860.190	60.860.190	60.860.190	UPT. RS Kusta Lausimomo
1.02.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	56.366.300	56.366.300	56.366.300	56.366.300	56.366.300	56.366.300	UPT. RS Indrapura
1.02.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	23.437.942	23.437.942	23.437.942	23.437.942	23.437.942	23.437.942	UPT. Laboratorium Kesehatan
1.02.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	67.915.670	67.915.670	67.915.670	67.915.670	67.915.670	71.740.670	UPT. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	411.785.985	411.785.985	411.785.985	411.785.985	411.785.985	561.785.985	Kantor Dinkes (penyediaan ATK)
1.02.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	87.983.730	87.983.730	87.983.730	87.983.730	87.983.730	133.734.315	UPT. RS Khusus Mata (penyediaan ATK)
1.02.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	74.774.187	74.774.187	74.774.187	74.774.187	74.774.187	74.774.187	UPT. RS Khusus Paru (penyediaan ATK)
1.02.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	103.289.054	103.289.054	103.289.054	103.289.054	103.289.054	103.289.054	UPT. RS Kusta Lausimomo (penyediaan ATK)
1.02.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	114.119.412	114.119.412	114.119.412	114.119.412	114.119.412	114.119.412	UPT. RS Indrapura (penyediaan ATK)
1.02.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	63.341.500	63.341.500	63.341.500	63.341.500	63.341.500	63.341.500	UPT. Laboratorium Kesehatan (penyediaan ATK)

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2022
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

1.02.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	328.647.210	328.647.210	328.647.210	328.647.210	328.647.210	328.647.210	UPT. Pelatihan Kesehatan (penyediaan ATK)
1.02.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	114.323.569	114.323.569	114.323.569	114.323.569	114.323.569	114.323.569	Kantor Dinkes (penyediaan peralatan kebersihan)
1.02.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	106.557.305	106.557.305	106.557.305	106.557.305	106.557.305	106.557.305	UPT. RS Khusus Mata (penyediaan peralatan kebersihan)
1.02.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	119.998.500	119.998.500	119.998.500	119.998.500	119.998.500	119.998.500	UPT. RS Khusus Paru (penyediaan peralatan kebersihan)
1.02.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	90.493.170	90.493.170	90.493.170	90.493.170	90.493.170	90.493.170	UPT. RS Kusta Lausimomo (penyediaan peralatan kebersihan)
1.02.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	180.528.700	180.528.700	180.528.700	180.528.700	180.528.700	180.528.700	UPT. RS Indrapura (penyediaan peralatan kebersihan)
1.02.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	32.850.500	32.850.500	32.850.500	32.850.500	32.850.500	32.850.500	UPT. Laboratorium Kesehatan (penyediaan peralatan kebersihan)
1.02.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	138.735.844	138.735.844	138.735.844	138.735.844	138.735.844	106.735.844	UPT. Pelatihan Kesehatan (penyediaan peralatan kebersihan)
1.02.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	120.310.000	120.310.000	120.310.000	120.310.000	120.310.000	320.310.000	Kantor Dinkes
1.02.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	183.720.000	183.720.000	183.720.000	183.720.000	183.720.000	239.320.000	UPT. RS Khusus Mata
1.02.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	186.740.200	186.740.200	186.740.200	186.740.200	186.740.200	186.740.200	UPT. RS Khusus Paru
1.02.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	78.346.750	78.346.750	78.346.750	78.346.750	78.346.750	78.346.750	UPT. RS Kusta Lausimomo
1.02.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	166.723.800	166.723.800	166.723.800	166.723.800	166.723.800	166.723.800	UPT. RS Indrapura
1.02.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	86.925.000	86.925.000	86.925.000	86.925.000	86.925.000	86.925.000	UPT. Laboratorium Kesehatan
1.02.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.297.500	50.297.500	50.297.500	50.297.500	50.297.500	50.297.500	UPT. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48.482.500	48.482.500	48.482.500	48.482.500	48.482.500	48.482.500	Kantor Dinkes
1.02.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.030.000	15.030.000	15.030.000	15.030.000	15.030.000	10.030.000	UPT. RS Khusus Mata
1.02.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.080.000	10.080.000	10.080.000	10.080.000	10.080.000	10.080.000	UPT. RS Khusus Paru
1.02.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	UPT. RS Kusta Lausimomo
1.02.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	16.200.000	UPT. RS Indrapura
1.02.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	UPT. Laboratorium Kesehatan
1.02.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	53.220.000	53.220.000	53.220.000	53.220.000	53.220.000	53.220.000	UPT. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.06.08	Fasilitas kunjungan tamu	318.000.000	318.000.000	318.000.000	318.000.000	318.000.000	518.000.000	Kantor Dinkes
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	925.834.091	925.834.091	925.834.091	925.834.091	925.834.091	1.725.834.093	Kantor Dinkes
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	64.026.000	64.026.000	64.026.000	64.026.000	64.026.000	64.026.000	UPT. RS Khusus Mata
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	54.866.000	54.866.000	54.866.000	54.866.000	54.866.000	54.866.000	UPT. RS Khusus Paru

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2022
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	87.746.000	87.746.000	87.746.000	87.746.000	87.746.000	87.746.000	UPT. RS Kusta Lausimomo
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35.700.000	35.700.000	35.700.000	35.700.000	35.700.000	35.700.000	UPT. RS Indrapura
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	85.946.000	85.946.000	85.946.000	85.946.000	85.946.000	85.946.000	UPT. Laboratorium Kesehatan
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	70.860.000	70.860.000	70.860.000	70.860.000	70.860.000	109.668.000	UPT. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	100.000.000	Kantor Dinkes
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.387.107.117	6.387.107.117	6.387.107.117	6.387.107.117	6.387.107.117	8.370.617.737	
1.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.840.000.000	3.840.000.000	3.840.000.000	3.840.000.000	3.840.000.000	4.540.000.000	Kantor Dinkes
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	488.287.500	488.287.500	488.287.500	488.287.500	488.287.500	488.287.500	Kantor Dinkes
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	194.933.250	194.933.250	194.933.250	194.933.250	194.933.250	576.080.372	UPT. RS Khusus Mata
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	125.437.500	UPT. RS Khusus Paru
1.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	465.010.275	465.010.275	465.010.275	465.010.275	465.010.275	465.010.275	UPT. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.07.06	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	233.922.478	233.922.478	233.922.478	233.922.478	233.922.478	233.922.478	Kantor Dinkes
1.02.01.1.07.06	Penyediaan peralatan dan mesin lainnya	183.090.264	183.090.264	183.090.264	183.090.264	183.090.264	589.927.764	UPT. RS Khusus Paru
1.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	421.172.500	421.172.500	421.172.500	421.172.500	421.172.500	418.832.500	UPT. Laboratorium Kesehatan
1.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	495.690.850	495.690.850	495.690.850	495.690.850	495.690.850	933.119.348	UPT. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	18.780.107.100	18.780.107.100	18.780.107.100	18.780.107.100	18.780.107.100	19.036.429.000	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	29.600.000	29.600.000	29.600.000	29.600.000	29.600.000	29.600.000	Kantor Dinkes
1.02.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.710.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000	UPT. RS Khusus Mata
1.02.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	UPT. RS Khusus Paru
1.02.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	UPT. RS Kusta Lausimomo
1.02.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	UPT. RS Indrapura
1.02.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	6.525.000	6.525.000	6.525.000	6.525.000	6.525.000	4.750.000	UPT. Laboratorium Kesehatan
1.02.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	UPT. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	1.850.000.000	Kantor Dinkes
1.02.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	500.000.000	UPT. RS Khusus Mata
1.02.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	310.000.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000	UPT. RS Khusus Paru
1.02.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	UPT. RS Kusta Lausimomo
1.02.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	UPT. RS Indrapura
1.02.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	380.000.000	380.000.000	380.000.000	380.000.000	380.000.000	580.000.000	UPT. Laboratorium Kesehatan
1.02.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	644.138.500	644.138.500	644.138.500	644.138.500	644.138.500	745.000.000	UPT. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	6.650.755.200	6.650.755.200	6.650.755.200	6.650.755.200	6.650.755.200	7.132.393.400	Kantor Dinkes (honor BP-JHC, Dewas RS, security, CS, tenaga kontrak, dll)

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2022
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

1.02.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.699.421.000	1.699.421.000	1.699.421.000	1.699.421.000	1.699.421.000	1.744.421.000	UPT. RS Khusus Mata (security, CS, tenaga kontrak, dll)
1.02.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.640.378.000	1.640.378.000	1.640.378.000	1.640.378.000	1.640.378.000	1.700.378.000	UPT. RS Khusus Paru (security, CS, tenaga kontrak, dll)
1.02.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.234.759.800	1.234.759.800	1.234.759.800	1.234.759.800	1.234.759.800	1.255.759.800	UPT. RS Kusta Lausimomo (security, CS, tenaga kontrak, dll)
1.02.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.143.977.800	1.143.977.800	1.143.977.800	1.143.977.800	1.143.977.800	575.575.000	UPT. RS Indrapura (security, CS, tenaga kontrak, dll)
1.02.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.003.820.900	1.003.820.900	1.003.820.900	1.003.820.900	1.003.820.900	1.021.820.900	UPT. Laboratorium Kesehatan (security, CS, tenaga kontrak, dll)
1.02.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.323.270.900	1.323.270.900	1.323.270.900	1.323.270.900	1.323.270.900	1.323.270.900	UPT. Pelatihan Kesehatan (security, CS, tenaga kontrak, dll)
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.647.117.513	16.647.117.513	16.647.117.513	16.647.117.513	16.647.117.513	17.669.695.013	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1.214.420.000	1.214.420.000	1.214.420.000	1.214.420.000	1.214.420.000	583.420.000	Kantor Dinkes
1.02.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	971.630.000	971.630.000	971.630.000	971.630.000	971.630.000	1.271.610.000	Kantor Dinkes
1.02.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	UPT. RS Khusus Mata
1.02.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100.410.000	100.410.000	100.410.000	100.410.000	100.410.000	100.410.000	UPT. RS Khusus Paru
1.02.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	90.296.000	90.296.000	90.296.000	90.296.000	90.296.000	86.596.000	UPT. RS Kusta Lausimomo
1.02.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100.410.000	100.410.000	100.410.000	100.410.000	100.410.000	100.410.000	UPT. RS Indrapura
1.02.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	UPT. Laboratorium Kesehatan
1.02.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	66.940.000	UPT. Pelatihan Kesehatan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2022
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	425.450.000	425.450.000	425.450.000	425.450.000	425.450.000	1.225.450.000	Kantor Dinkes
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	84.700.000	84.700.000	84.700.000	84.700.000	84.700.000	69.700.000	UPT. RS Khusus Mata
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	114.250.000	114.250.000	114.250.000	114.250.000	114.250.000	114.250.000	UPT. RS Khusus Paru
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	185.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000	185.000.000	UPT. RS Kusta Lausimomo
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	54.200.000	54.200.000	54.200.000	54.200.000	54.200.000	49.700.000	UPT. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	12.275.785.000	12.275.785.000	12.275.785.000	12.275.785.000	12.275.785.000	12.584.582.500	Kantor Dinkes
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	744.496.513	744.496.513	744.496.513	744.496.513	744.496.513	1.012.496.513	UPT. Pelatihan Kesehatan
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.250.000	85.250.000	85.250.000	85.250.000	85.250.000	85.250.000	UPT. Pelatihan Kesehatan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	361.907.121.890	369.040.006.060	369.040.006.060	369.040.006.060	369.040.006.060	367.791.273.300	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	34.849.291.944	34.849.291.944	34.849.291.944	34.849.291.944	34.849.291.944	35.999.031.491	
1.02.02.1.01.06	Pengembangan pendekatan pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	7.914.847.569	7.914.847.569	7.914.847.569	7.914.847.569	7.914.847.569	7.914.847.569	Kantor Dinkes
1.02.02.1.01.06	Pengembangan pendekatan pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	328.156.101	328.156.101	328.156.101	328.156.101	328.156.101	372.499.502	UPT. RS Khusus Mata
1.02.02.1.01.06	Pengembangan pendekatan pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	338.226.346	338.226.346	338.226.346	338.226.346	338.226.346	380.280.424	UPT. RS Khusus Paru
1.02.02.1.01.06	Pengembangan pendekatan pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	210.055.664	210.055.664	210.055.664	210.055.664	210.055.664	274.188.064	UPT. Laboratorium Kesehatan
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	185.112.718	185.112.718	185.112.718	185.112.718	185.112.718	185.112.718	UPT. RS Khusus Mata
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	288.775.925	288.775.925	288.775.925	288.775.925	288.775.925	318.925.925	UPT. RS Khusus Paru
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	0	UPT. RS Khusus Mata

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2022
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	27.550.000	27.550.000	27.550.000	27.550.000	27.550.000	27.550.000	UPT. RS Kusta Lausimomo
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/ Peralatan Laboratorium Kesehatan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	UPT. RS Khusus Paru
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/ Peralatan Laboratorium Kesehatan	4.165.434.327	4.165.434.327	4.165.434.327	4.165.434.327	4.165.434.327	4.993.193.995	UPT. Laboratorium Kesehatan
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	404.605.000	404.605.000	404.605.000	404.605.000	404.605.000	404.605.000	Kantor Dinkes
1.02.02.1.01.22	Pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas Kesehatan lainnya	20.827.828.294	20.827.828.294	20.827.828.294	20.827.828.294	20.827.828.294	20.977.828.294	Kantor Dinkes
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	324.488.340.946	331.621.225.116	331.621.225.116	331.621.225.116	331.621.225.116	329.273.975.509	
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	2.519.951.800	2.519.951.800	2.519.951.800	1.846.557.800	1.846.557.800	1.846.557.800	
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	50.390.298.413	57.523.182.583	57.523.182.583	58.196.576.583	58.196.576.583	53.575.648.945	Untuk penanganan COVID-19
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu dan anak	2.095.557.400	2.095.557.400	2.095.557.400	2.095.557.400	2.095.557.400	1.852.104.000	
1.02.02.1.02.04	Pengelolaan pelayanan Kesehatan usia produktif	459.847.000	459.847.000	459.847.000	459.847.000	459.847.000	459.847.000	
1.02.02.1.02.05	Pengelolaan pelayanan Kesehatan usia lanjut	427.972.650	427.972.650	427.972.650	427.972.650	427.972.650	427.972.650	
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat	37.003.722.700	37.003.722.700	37.003.722.700	37.003.722.700	37.003.722.700	37.003.722.700	
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	1.190.566.065	1.190.566.065	1.190.566.065	1.190.566.065	1.190.566.065	509.863.500	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan pelayanan Kesehatan lingkungan	1.173.635.000	1.173.635.000	1.173.635.000	1.173.635.000	1.173.635.000	1.119.068.065	
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan pelayanan promosi Kesehatan	583.851.000	583.851.000	583.851.000	583.851.000	583.851.000	583.851.000	
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan pelayanan Kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	224.660.000	224.660.000	224.660.000	224.660.000	224.660.000	224.660.000	
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	2.178.948.600	2.478.948.600	2.478.948.600	2.478.948.600	2.478.948.600	2.478.948.600	
1.02.02.1.02.12	Pengelolaan pelayanan Kesehatan haji	100.170.000	100.170.000	100.170.000	100.170.000	100.170.000	67.202.000	
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	485.815.000	485.815.000	485.815.000	485.815.000	485.815.000	485.815.000	
1.02.02.1.02.14	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan kecanduan NAPZA	207.049.000	207.049.000	207.049.000	207.049.000	207.049.000	207.049.000	
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan jaminan Kesehatan masyarakat	206.951.112.800	206.951.112.800	206.951.112.800	206.951.112.800	206.951.112.800	206.951.112.800	

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2022
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

1.02.02.1.02.17	Pengelolaan surveilans Kesehatan	186.213.000	186.213.000	186.213.000	186.213.000	186.213.000	185.613.000	
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM Bidang Kesehatan lintas kabupaten/kota	335.903.000	335.903.000	335.903.000	335.903.000	335.903.000	449.957.000	
1.02.02.1.02.19	Pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan Kesehatan	494.997.000	494.997.000	494.997.000	494.997.000	494.997.000	239.592.000	
1.02.02.1.02.20	Verifikasi dan penilaian kelayakan Puskesmas untuk registrasi Puskesmas	123.213.700	123.213.700	123.213.700	123.213.700	123.213.700	123.213.700	
1.02.02.1.02.21	Investigasi lanjutan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal oleh kabupaten/kota	105.608.000	105.608.000	105.608.000	105.608.000	105.608.000	102.008.000	
1.02.02.1.02.22	Operasional pelayanan rumah sakit	3.355.565.529	3.355.565.529	3.355.565.529	3.355.565.529	3.355.565.529	4.358.901.834	UPT. RS Khusus Mata
1.02.02.1.02.22	Operasional pelayanan rumah sakit	4.763.303.522	4.763.303.522	4.763.303.522	4.763.303.522	4.763.303.522	5.374.447.135	UPT. RS Khusus Paru
1.02.02.1.02.22	Operasional pelayanan rumah sakit	2.402.240.160	2.402.240.160	2.402.240.160	2.402.240.160	2.402.240.160	3.903.246.923	UPT. RS Kusta Lausimomo
1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3.967.571.000	3.667.571.000	3.667.571.000	3.667.571.000	3.667.571.000	3.667.571.000	Terdapat belanja hibah untuk PMI sebesar 2,7 Milyar
1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit potensial KLB ke lab rujukan/nasional	38.780.000	38.780.000	38.780.000	38.780.000	38.780.000	38.780.000	
1.02.02.1.02.27	Pendampingan fasilitas pelayanan Kesehatan	600.417.000	600.417.000	600.417.000	600.417.000	600.417.000	600.417.000	
1.02.02.1.02.28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	2.121.371.607	2.121.371.607	2.121.371.607	2.121.371.607	2.121.371.607	1.517.628.357	
1.02.02.1.02.30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0	0	0	0	0	255.405.000	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	965.540.400	965.540.400	965.540.400	965.540.400	965.540.400	1.172.184.500	
1.02.02.1.03.01	Pengelolaan data dan informasi Kesehatan	430.415.000	430.415.000	430.415.000	430.415.000	430.415.000	430.415.000	
1.02.02.1.03.02	Pengelolaan sistem informasi Kesehatan	382.297.400	382.297.400	382.297.400	382.297.400	382.297.400	588.941.500	
1.02.02.1.03.03	Pengadaan alat/ perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan internet	152.828.000	152.828.000	152.828.000	152.828.000	152.828.000	152.828.000	UPT. RS Khusus Paru
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.603.948.600	1.603.948.600	1.603.948.600	1.603.948.600	1.603.948.600	1.346.081.800	
1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan Kesehatan	422.964.000	422.964.000	422.964.000	422.964.000	422.964.000	227.412.000	
1.02.02.1.04.02	Peningkatan tata Kelola rumah sakit	634.683.600	634.683.600	634.683.600	634.683.600	634.683.600	572.368.800	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas Kesehatan	546.301.000	546.301.000	546.301.000	546.301.000	546.301.000	546.301.000	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	21.174.603.450	22.104.603.450	22.104.603.450	22.104.603.450	22.104.603.450	17.875.785.450	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	19.137.225.000	20.067.225.000	20.067.225.000	20.067.225.000	20.067.225.000	15.968.384.000	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia Kesehatan	18.864.991.000	19.794.991.000	19.794.991.000	19.794.991.000	19.794.991.000	15.696.150.000	

1.02.03.1.01.02	Distribusi dan pemerataan sumber daya manusia Kesehatan	272.234.000	272.234.000	272.234.000	272.234.000	272.234.000	272.234.000	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.037.378.450	2.037.378.450	2.037.378.450	2.037.378.450	2.037.378.450	1.907.401.450	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia Kesehatan	688.132.500	688.132.500	688.132.500	688.132.500	688.132.500	865.975.950	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia Kesehatan	995.952.950	995.952.950	995.952.950	995.952.950	995.952.950	688.132.500	UPT. Pelatihan Kesehatan
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kesehatan	353.293.000	353.293.000	353.293.000	353.293.000	353.293.000	353.293.000	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	442.574.500	442.574.500	442.574.500	442.574.500	442.574.500	442.574.500	
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	442.574.500	442.574.500	442.574.500	442.574.500	442.574.500	442.574.500	
1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	356.066.000	356.066.000	356.066.000	356.066.000	356.066.000	356.066.000	
1.02.04.1.01.02	Penyediaan dan pengelolaan data perizinan pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK berbasis elektronik	86.508.500	86.508.500	86.508.500	86.508.500	86.508.500	86.508.500	
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.694.297.500	1.694.297.500	1.694.297.500	1.694.297.500	1.694.297.500	2.372.545.115	
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	420.190.000	420.190.000	420.190.000	420.190.000	420.190.000	483.736.917	
1.02.05.1.01.01	Peningkatan upaya advokasi Kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sector tingkat daerah Provinsi	420.190.000	420.190.000	420.190.000	420.190.000	420.190.000	483.736.917	
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	860.889.000	860.889.000	860.889.000	860.889.000	860.889.000	1.475.589.698	
1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan promosi Kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	860.889.000	860.889.000	860.889.000	860.889.000	860.889.000	1.475.589.698	
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	413.218.500	413.218.500	413.218.500	413.218.500	413.218.500	413.218.500	
1.02.05.1.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi UKBM	413.218.500	413.218.500	413.218.500	413.218.500	413.218.500	413.218.500	
Jumlah		564.487.942.056	572.550.826.226	572.550.826.226	572.550.826.226	572.550.826.226	606.345.362.826	

BAB IV Penutup

Perubahan Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 disusun melalui berbagai tahapan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja PD ini juga disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis Nasional dan prioritas pembangunan dalam RKP tahun 2022, isu-isu strategis daerah, serta tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2017, serta nomenklatur program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam penyusunannya, diperhatikan prinsip-prinsip yang menjamin keserasian, efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana yang tersedia.

Perubahan Renja PD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022. Kita berharap, program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja PD ini dapat berkontribusi dalam pencapaian visi ***Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat*** serta misi ***Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki kesehatan yang prima.***

Medan, 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara,



drg. Ismail Lubis, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19710204 200003 1 002



Lampiran

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA OPD LINGKUP PROVINSI DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE PELAKSANA : 2022																												
No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggu ng Jawab	Ket.	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		TUJUAN SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA	1. Umur Harapan Hidup (UHH) 1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup 2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup 3. Persentase Balita Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) 4. Angka Kesakitan (Morbiditas)	69.5 Tahun 67.39 2.22 26.50% 12.20%		69,23 Tahun 89.18 2.28 25.80% 8.78%		69.35 Tahun 79.40 2.32 27.50% 12.22%				69.35 Tahun 12.21 0.63 25.80% 8.78%						69.35 Tahun 12.21 0.63 25.80% 8.78%				69.35 Tahun 12.21 0.63 25.80% 8.78%			99.78 67.67 97.30 102.64 128.03			
I 1	01	BELANJA URUSAN WAJIB PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							572,550,826,226	5.79	33,145,621,979		198,611,758,660					5.79	231,757,380,639		40.48	5.79	231,757,380,639					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							179,269,344,716	9.79	17,554,954,298		70,977,360,299					- 9.79	88,532,314,597		49.39	9.79	88,532,314,597					
	01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Tersusun	66 Dok		40 Dok		13 Dok		8 Dok		81,718,600	3 Dok	309,194,150				- 11 Dok	390,912,750	85%	38.36	51 Dok	390,912,750	77.27		Dinkes Provsu		
	01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Outcome : - Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Tersusun Output : - Persentase Pemenuhan layanan administrasi	66 Dok 100%		40 Dok 100%		13 Dok 100%		8 Dok 25%		80,818,600 25%	3 Dok 25%	139,807,860				11 Dok 50%	220,626,460 50%	85% 50%	50.65 50%	51 Dok 50%	220,626,460 50%	77.27 77.27				
	01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Outcome : - Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Tersusun Output : - Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	66 Dok 11 Dok		40 Dok 11 Dok		13 Dok 5 Dok		8 Dok 3 Dok		3 Dok 1 Dok	10,980,000					11 Dok 4 Dok	10,980,000 80%	85% 80%	48.46 15 Dok	51 Dok 20 Dok	10,980,000 10,980,064	77.27 77.27		Dinkes Provsu		
	01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -	Outcome : - Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Tersusun Output : - Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	66 Dok 16 Dok		40 Dok 16 Dok		13 Dok 5 Dok		8 Dok 3 Dok		3 Dok 1 Dok	10,980,000					11 Dok 4 Dok	10,980,000 80%	85% 80%	48.46 20 Dok	51 Dok 20 Dok	10,980,000 10,980,064	77.27 77.27		Dinkes Provsu		
	01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Outcome : - Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Tersusun Output : - Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	66 Dok 16 Dok		40 Dok 16 Dok		13 Dok 5 Dok		8 Dok 3 Dok		3 Dok 1 Dok	10,980,000					11 Dok 4 Dok	10,980,000 85%	85% 63.92	51 Dok 51 Dok	10,980,064 10,980,064	77.27 77.27		Dinkes Provsu			

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Outcome : - Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Tersusun Output : - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	66 Dok		40 Dok		13 Dok	14,235,600	8 Dok		3 Dok	10,980,000					11 Dok	10,980,000	85%	77.13	51 Dok	10,980,000	77.27		Dinkes Provsu	
	01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Outcome : - Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Tersusun Output : - Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersedia	66 Dok		40 Dok		13 Dok	46,668,000	8 Dok	900,000	3 Dok						11 Dok	900,000	85%	1.93	51 Dok	900,000	77.27		Dinkes Provsu	
	01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Outcome : - Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan yang Tersusun Output : - Jumlah dokumen evaluasi pembangunan kesehatan	66 Dok		40 Dok		13 Dok	460,096,000	8 Dok		3 Dok	125,466,290						11 Dok	125,466,290	85%	27.27	51 Dok	125,466,290	77.27		Dinkes Provsu
2	01.1.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia	15 Dok		9 Dok		3 Dok	129,814,201,000	0	14,375,238,679	1 Dok	61,454,560,536					100%	75,829,799,215	33%	58.41	100%	75,829,799,215	6.67		Dinkes Provsu	
	01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Outcome : - Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia Output : - Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dinas kesehatan dan UPT	15 Dok		9 Dok		3 Dok	127,007,078,000	0	14,071,978,679	1 Dok	61,160,310,536					1 Dok	75,232,289,215	33%	59.23	100%	75,232,289,215	6.67		Dinkes Provsu	
	01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Outcome : - Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia Output : - Jumlah kebutuhan administrasi pelaksanaan tugas	15 Dok		9 Dok		3 Dok	2,435,160,000	0	296,210,000	1 Dok	262,840,000					1 Dok	559,050,000	33%	22.96	100%	559,050,000	6.67		Dinkes Provsu	
	01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Outcome : - Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia Output : - Bahan pelaksanaan verifikasi yang disiapkan	15 Dok		9 Dok		3 Dok	64,072,000	0		1 Dok	6,300,000					1 Dok	6,300,000	33%	9.83	100%	6,300,000	6.67		Dinkes Provsu	
	01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Outcome : - Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia Output : - Jumlah dokumen akuntansi dan laporan keuangan yang disusun	15 Dok		9 Dok		3 Dok	23,930,000	0	1,350,000	1 Dok						1	1,350,000	33%	5.64	100%	1,350,000	6.67		Dinkes Provsu	
	01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Outcome : - Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia	15 Dok		9 Dok		3 Dok	14,025,000	0		1 Dok						1 Dok		33%	0.00	100%	-	6.67		Dinkes Provsu	

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Output : - Jumlah dokumen penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun					1 Dok		0		0						0									
	01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Outcome : - Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia Output : - Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang disusun	15 Dok		9 Dok		3 Dok	124,186,000	0	5,400,000	1 Dok	14,540,000					1 Dok	19,940,000	33%	16.06	100%	19,940,000	6.67		Dinkes Provsu	
	01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Outcome : - Jumlah Dokumen Keuangan yang Tersedia Output : - Jumlah dokumen Laporan Keuangan bulanan/semesteran yang disusun	15 Dok		9 Dok		3 Dok	145,750,000	0	300,000	1 Dok	10,570,000					1 Dok	10,870,000	33%	7.46	100%	10,870,000	6.67		Dinkes Provsu	
3	01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Jumlah Dokumen Aset (Inventarisasi Barang)	25 Dok		15 Dok		5 Dok	322,260,000	0	-	2 Dok	123,805,000					2 Dok	123,805,000	40%	38.42	200%	123,805,000	8.00		Dinkes Provsu	
	01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik daerah SKPD	Outcome : - Jumlah Dokumen Aset (Inventarisasi Barang) Output : - Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	25 Dok		15 Dok		5 Dok	3,975,000	0		2 Dok						2 Dok		40%	0.00	200%	-			Dinkes Provsu	
	01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Outcome : - Jumlah Dokumen Aset (Inventarisasi Barang) Output : - Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan penlaiaian BMD	25 Dok		15 Dok		5 Dok	20,250,000	0		2 Dok						2 Dok		40%	0.00	200%	-	8.00		Dinkes Provsu	
	01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Outcome : - Jumlah Dokumen Aset (Inventarisasi Barang) Output : - Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD	25 Dok		15 Dok		5 Dok	34,950,000	0		2 Dok	10,305,000					2 Dok	10,305,000	40%	29.48	200%	10,305,000	8.00		Dinkes Provsu	
	01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Outcome : - Jumlah Dokumen Aset (Inventarisasi Barang) Output : - Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi BMD	25 Dok		15 Dok		5 Dok	18,585,000	0		2 Dok						2 Dok		40%	0.00	200%	-	8.00		Dinkes Provsu	
	01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Outcome : - Jumlah Dokumen Aset (Inventarisasi Barang) Output : - Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD)	25 Dok		15 Dok		5 Dok	244,500,000	0		2 Dok	113,500,000					2 Dok	113,500,000	40%	46.42	200%	113,500,000	8.00		Dinkes Provsu	

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Disusun	5 Dok		3 Dok		1 Dok	842,697,000	0	19,500,000	1 Dok	90,409,481					1 Dok	109,909,481	125%	13.04	125%	109,909,481	25.00			Dinkes Provsu	
	01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Outcome : - Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Disusun Output : - Jumlah Dokumen Laporan Kepegawaian Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara	5 Dok		3 Dok		1 Dok	21,990,000	0	7,200,000	1 Dok	5,020,000					1 Dok	12,220,000	125%	55.57	125%	12,220,000	25.00			Dinkes Provsu	
	01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Outcome : - Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Disusun Output : - Jumlah Laporan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dok		3 Dok		1 Dok	40,380,000	0	4,200,000	1 Dok	13,570,000					1 Dok	17,770,000	100%	44.01	100%	17,770,000	20.00			Dinkes Provsu	
	01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Outcome : - Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Disusun Output : - Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dok		3 Dok		1 Dok	45,600,000	0		1 Dok	5,020,000					1 Dok	5,020,000	100%	11.01	125%	5,020,000	25.00			Dinkes Provsu	
	01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Outcome : - Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Disusun Output : - Jumlah unit kerja yang memperoleh dukungan pendidikan dan pelatihan formal	5 Dok		3 Dok		1 Dok	680,907,000	0		1 Dok	60,607,481					1 Dok	60,607,481	100%	8.90	125%	60,607,481	25.00			Dinkes Provsu	
	01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Outcome : - Jumlah Dokumen Kepegawaian yang Disusun Output : - Jumlah UPT yang dilakukan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Dok		3 Dok		1 Dok	53,820,000	0	8,100,000	1 Dok	6,192,000					1 Dok	14,292,000	100%	26.56	125%	14,292,000	25.00			Dinkes Provsu	
5	01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Umum yang Disusun	5 Dok		3 Dok		1 Dok	5,456,807,427	0	604,409,828		2,154,905,871					0	2,759,315,699	25%	50.57	25%	2,759,315,699	5.00			Dinkes Provsu	
	01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : - Jumlah Dokumen Umum yang Disusun Output : - Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Dok		3 Dok		1 Dok	399,624,920	0	50,250,000		113,409,445					0	163,659,445	25%	40.95	25%	163,659,445	5.00			Dinkes Provsu	
	01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Outcome : - Jumlah Dokumen Umum yang Disusun Output : - Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5 Dok		3 Dok		1 Dok	1,183,941,078	0			395,355,000					0	395,355,000	25%	33.39	25%	395,355,000	5.00			Dinkes Provsu	

[illegible]

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			- Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Output : - Jumlah mebel yang tersedia	100%		100%		100%	1,213,231,025	25%	-	25%	26,862,000					50%	26,862,000	50%	2.21	50%	26,862,000	50.00		Dinkes Provsu	
	01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Outcome : - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Output : - Jumlah laptop dan printer yang tersedia	100%		100%		100%	417,012,742	25%	-	25%	153,220,050					50%	153,220,050	50%	36.74	50%	153,220,050	50.00		Dinkes Provsu	
	01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Outcome : - Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Output : - Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia	100%		100%		100%	916,863,350	25%	-	25%	109,650,000					50%	109,650,000	50%	11.96	50%	109,650,000	50.00		Dinkes Provsu	
6	01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Umum yang Disusun	5 Dok		3 Dok		1 Dok	18,780,107,100	0	2,030,284,153		4,565,989,405				-	0	6,596,273,558	25%	35.12	25%	6,596,273,558	5.00		Dinkes Provsu	
	01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Outcome : - Jumlah Dokumen Umum yang Disusun Output : - Jumlah kebutuhan surat menyurat	5 Dok		3 Dok		1 Dok	44,585,000	0	22,912,000		8,100,000					0	31,012,000	25%		25%	31,012,000	5.00		Dinkes Provsu	
	01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Outcome : - Jumlah Dokumen Umum yang Disusun Output : - Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	5 Dok		3 Dok		1 Dok	4,039,138,500	0	718,799,593		776,693,422					0	1,495,493,015	25%	37.03	25%	1,495,493,015	5.00		Dinkes Provsu	
	01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Outcome : - Jumlah layanan umum kantor yang disediakan jumlah unit kerja yang disediakan jasa keamanan Output : - Jumlah Layanan Umum Kantor yang disediakan	5 Dok		3 Dok		1 Dok	14,696,383,600	0	1,288,572,560	1 Dok	3,781,195,983					1 Dok	5,069,768,543	100%	34.50	1 Dok	5,069,768,543	25.00		Dinkes Provsu	
7	01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	15 Layanan		9 Layanan		3 Layanan	16,647,117,513	0	443,803,038		1,289,763,806					0	1,733,566,844	8%	10.41	25%	1,733,566,844	1.67		Dinkes Provsu	
	01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Outcome : - Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Output : - Jumlah kebutuhan jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	15 Layanan		9 Layanan		3 Layanan	1,214,420,000	1 Layanan	38,344,720	1 Layanan	236,711,898					2 Layanan	275,056,618	67%	22.65	2 Layanan	275,056,618	13.33		Dinkes Provsu	

No	Kode	Usuran Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggu ng Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Outcome : - Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Output : - Jumlah kebutuhan jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional	15 Layanan		9 Layanan		3 Layanan	1,463,566,000	1 Layanan	347,326,318	1 Layanan	358,826,708					2 Layanan	706,153,026	67%	48.25	2	706,153,026	13.33		Dinkes Provsu	
	01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Outcome : - Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Output : - Jumlah layanan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	15 Layanan		9 Layanan		3 Layanan	863,600,000	1 Layanan	49,475,000	1 Layanan	467,421,000					2 Layanan	516,896,000	67%	59.85	2 Layanan	516,896,000	13.33		Dinkes Provsu	
	01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Outcome : - Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Output : - Jumlah perawatan sedang gedung negara jumlah rehab plafon	15 Layanan		9 Layanan		3 Layanan	13,020,281,513	1 Layanan	8,657,000	1 Layanan	220,804,200					2 Layanan	229,461,200	67%	1.76	2 Layanan	229,461,200	13.33		Dinkes Provsu	
	01.1.09.10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Prasarana	Outcome : - Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Output : - Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	15 Layanan		9 Layanan		3 Layanan	85,250,000	1 Layanan		1 Layanan	6,000,000					2 Layanan	6,000,000	67%	7.04	2 Layanan	6,000,000	13.33		Dinkes Provsu	
Rata-rata capaian kinerja (%)									179,269,344,716	0	17,554,954,298						-	0	17,554,954,298	0%	9.79		17,554,954,298	#DIV/0!			
Predikat kinerja																											
II	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							369,040,006,060		12,762,736,252		121,306,751,733					36.33	134,069,487,985		36.33		134,069,487,985				
1	02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan,Sarana,Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang ditingkatkan					300 Paket	34,849,291,944	0	15,000,000	11 Paket	1,228,644,110					11 Paket	1,243,644,110	4%	3.57	11 Paket	1,243,644,110			Dinkes Provsu	
	02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine,dll)	Outcome : - Persentase Puskesmas yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di DTPK Output : - Jumlah Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang dilakukan	60%		30%		55%	8,791,285,680	35%		35%	896,720,172					35%	896,720,172	64%	10.20	35%	896,720,172	58.33		Dinkes Provsu	
	02.1.01.10	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Outcome : - Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru - Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Mata	95%		94.11%		90%	473,888,643	-										0%	0.00	0.00%		0.00		Dinkes Provsu	

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17	
			dan tindak lanjut pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana					dokumen																				
	02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Outcome : - Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi Output : - Jumlah kab/kota yang memiliki Tenaga Kesehatan yang mampu melakukan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)	100%		100%		100%	57,523,182,583	100%	1,795,902,710	100%	20,213,349,806					100%	22,009,252,516	100%	38.26	100%	22,009,252,516	100.00		Dinkes Provsu		
	02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Outcome : - Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan - Cakupan Pelayanan Nifas sesuai Standar - Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard - Persentase Anak 0 – 11 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan - Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak-Rubella - Jumlah Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan Persentase anak Sekolah Dasar mendapatkan imunisasi lanjutan Difteri Tetanus (DT) Output : - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	100%		84%		100%	2,095,557,400	7.25%		26.63%	246,956,471					26.63%	246,956,471	26.63%	11.78	26.63%	246,956,471	26.63		Dinkes Provsu		
				100%		85%		100%		7.78%		27.99%						27.99%		27.99%		27.99%		27.99				
				100%		83%		100%		5.96%		18.39%						18.39%		18%		18.39%		18.39				
				100%		86%		100%		9.23%		25.76%						25.76%		26%		25.76%		25.76				
				100%		60%		100%		5.88%		17.53%						17.53%		18%		17.53%		17.53				
				94,6%		80.7%		94,1%		-		23.2%						23.20%		25%		23.20%		24.52				
				75%		55.7%		71%		-									0%		0.00%		0.00					
				90.3%		n/a		85.6%		-		18.6%						18.60%		22%		18.60%		20.60				
				30 K/K		n/a		29 K/K		-									0%		0.00%		0.00					
				93%		n/a		90%										-	0%		0.00%		0.00					
	02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Outcome : - Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Output : - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	100%		n/a		100%	459,847,000	7.77%		23.87%						23.87%		24%		23.87%		-	23.87		Dinkes Provsu	
								1	Dokumen																			
	02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Outcome : - Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Output : - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	100%		56.34%		100%	427,972,650	7.77%		23.87%	45,339,000					23.87%	45,339,000	24%	10.59	23.87%	45,339,000	23.87		Dinkes Provsu		
								1	Dokumen																			

[illegible]

No	Kode	Usuran Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
		Kesehatan	- Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi - Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk yang terdampak penyakit infeksi emerging - Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana - Persentase kabupaten/kota yang merespon alert SKDR minimal - Angka Non Acute Flaccyd Paralysis (AFP) per 100.000 anak usia <15 tahun Output : - Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100%		100%		100%	186,213,000	100%		100%	26,330,000					100%	26,330,000	100%	14.14	100.0%	26,330,000	100.00		Dinkes Provsu	
02.1.02.18		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Outcome : - Jumlah dokumen kerja sama program, lintas sektor, dan antar daerah dalam bidang kesehatan Output : - Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	35	Dok	?	Dok	7	335,903,000									-		0%	0.00	0	-	0.00		Dinkes Provsu	
02.1.02.19		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Outcome : - Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar - Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) dengan Pendekatan Keluarga - Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rawat Inap yang Menerapkan Pelayanan Kegawatdaruratan Output : - Jumlah dokumen hasil pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	75%		49.59%		65%	494,997,000	60%		57.72%	122,376,900					57.72%	122,376,900	89%	24.72	57.7%	122,376,900	76.96		Dinkes Provsu	
				60%		31.79%		50%		31.79%		31.79%						31.79%		63.58%		31.8%		52.98			
				100%		100%		100%		100%		100%						100%		100.00%		-		0.00			
02.1.02.20		Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Outcome : - Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Output : - Jumlah dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	75%		?		65%	123,213,700	60%		57.72%						57.72%		89%	0.00	57.7%	-	76.96		Dinkes Provsu	
02.1.02.21		Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal oleh	Outcome : - Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	94.6%		80.70%		94%	105,608,000			23.20%						23.20%		25%	0.00	23.2%	-	24.52		Dinkes Provsu	

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
		Kabupaten/Kota	- Jumlah Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan Output : - Jumlah Dokumen hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	30 K/K		?		29 Kab/Kota								-		0%				0.00					
	02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Outcome : - Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Mata - Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar di UPT. RS Khusus Paru - Persentase kesembuhan pasien Kusta di UPT. RS Kusta Lausimomo - Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPT. RS Kusta Lausimomo Persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPT. RS Indrapura Output : - Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	95%		85%		90%	10,521,109,211		2,421,552,593		1,137,008,072			-	3,558,560,665	0%	33.82	0.0%		0.00			Dinkes Provsu		
				95%		92%		90%							-		0%		0.0%		0.00						
				100%		26%		100%							-		0%		0.0%		0.00						
				85%		84%		90%							-		0%		0.0%		0.00						
				95%		69%		90%							-		0%		0.0%		0.00						
	02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Outcome : - Cakupan Pelaksanaan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Kab/ Kota - Cakupan Pelayanan Gawat Darurat di RSUD sesuai Standar Output : - Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, dikelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	73%		48%		61%	3,667,571,000		232,026,549		242,779,552			-	474,806,101	0%	12.95	0.0%	474,806,101	0.00			Dinkes Provsu		
				100%		97.50%		98%	97.50%						97.50%		99%				0.00						
	02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Outcome : - Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi Output : - Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang didistribusikan	100%		100%		100%	38,780,000	100%		100%			100%		100.00%	0.00	100.0%		-	100.00			Dinkes Provsu		
								175 Paket																			
	02.1.02.27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Outcome : - Persentase Fasyankes yang Memenuhi Standar Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) - Persentase RSUD yang Menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 Jam	90%		60%		44%	600,417,000	63%	33,153,400	65%	98,262,000			65%	131,415,400	148%	21.89	65.0%	131,415,400	72.22			Dinkes Provsu		
				100%		92%		96%		91.80%		91.80%			91.80%		95.63%		91.8%		91.80						

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			- Persentase RSUD Menerapkan PPK-BLUD Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang melaksanakan pelayanan Kesehatan sesuai standar Output : - Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%		67%		80%		69.20%		69.20%				69.20%		86.50%		69.2%		69.20					
				100%		91%		95%				90.95%				90.95%		95.74%		91.0%		90.95					
02.1.02.28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Outcome : - Persentase pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi Output : - Jumlah dokumen hasil penelitian yang berkualitas	100%		100%		100%	2,121,371,607	100%		100%	298,595,000				100%	298,595,000	100%	14.08	100.0%		100.00			Dinkes Provsu		
3	02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100%		100%		100%	965,540,400	100%	40,245,500	100%	226,759,007				100%	267,004,507	100.00%	27.65	100%	267,004,507	100.00			Dinkes Provsu	
	02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Outcome : - Persentase kabupaten/kota yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan Output : - Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100%		100%		100%	430,415,000	100%		100%	131,138,382				100%	131,138,382	100%	30.47	100.0%	131,138,382	100.00			Dinkes Provsu	
	02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Outcome : - Persentase kabupaten/kota yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan Output : - Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100%		100%		100%	382,297,400	100%	40,245,500	100%	95,620,625				100%	135,866,125	100%	35.54	100.0%	135,866,125	100.00			Dinkes Provsu	
	02.1.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Outcome : - Persentase kabupaten/kota yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan Output : - Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang tersedia	100%		100%		100%	152,828,000	100%		100%				100%		100%	0.00	100.0%		100.00			Dinkes Provsu		
4	02.1.04	Penertiban Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah rumah sakit dan fasyankes yang menerapkan standarisasi dan klasifikasi					9 RS	1,603,948,600	0	72,450,000	2 RS	55,386,000		127,836,000		2 RS	127,836,000	22%	7.97	2 RS	127,836,000			Dinkes Provsu		
	02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas	Outcome : - Persentase Rumah Sakit yang Menerapkan Standarisasi Klasifikasi sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	90%		62.74%		78.7%	422,964,000		26,620,000	72.99%	13,656,000				73%	40,276,000	93%	9.52	73.0%	40,276,000	81.10		Dinkes Provsu		

No	Kode	Usuran Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggu ng Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 (Sembilan) jenis tenaga Kesehatan - Persentase Rumah Sakit yang memiliki tenaga Kesehatan sesuai standar <u>Output :</u> - Jumlah dokumen hasil distribusi dan pemerataan SDMK	50%		n/a		43%	272,234,000			34.04%						34%		79%	0.00	34.0%		68.08		Dinkes Provsu	
				55%		n/a		45%				72%						72%		160%		72.0%		130.91			
2	03.1.02.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah SDMk yang dilatih pada pelatihanteknis/fungsional yang terakreditasi					335 Orang	2,037,378,450				76,280,000					-	76,280,000	0.00%			76,280,000			Dinkes Provsu	
	03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	<u>Outcome :</u> - Persentase Tenaga Kesehatan yang Dilatih pada Pelatihan Terakreditasi - Persentase Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya <u>Output :</u> Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi meningkat	3%		2%		2%	1,684,085,450			0.49%	76,280,000					0.49%	76,280,000	25%	4.53	0.49%	76,280,000	16.33		Dinkes Provsu	
				30%		11%		20%				11%						11.21%		56%		11.21%		37.37			
	03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	<u>Outcome :</u> - Persentase Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya <u>Output :</u> - Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	30%		11%		20%	353,293,000			11.21%						11.21%		56%	0.00	11.21%		37.37		Dinkes Provsu	
								1 Dokumen																			
Rata-rata capaian kinerja (%)									22,104,603,450			2,800,821,429							2,800,821,429		12.67		2,800,821,429				
Predikat kinerja																											
IV		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN						442,574,500		27,110,000		114,590,900						-	141,700,900				141,700,900				
1	04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam rangka pemenuhan standar GDP dan GMP pada sarana produksi dan distribusi kefarmasian					33 K/K	442,574,500	0	27,110,000	11 K/K	114,590,900					11 K/K	141,700,900	33.33%	32.02	11.0	141,700,900			Dinkes Provsu	
	04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	<u>Outcome :</u> - Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha - Persentase sarana produksi alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan rumah tangga (PKRT) yang menerapkan CPAKB, CPPKRTB, dan CDAKB Kesehatan Rumah Tangga yang Baik (CPPKRTB) serta Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CPKAB) - Persentase sarana pelayanan Kesehatan Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian - Persentase penggunaan obat rasional (POR) di Puskesmas	100%		n/a		100%	356,066,000	56%	27,110,000	87.50%	114,590,900					87.50%	141,700,900	88%	39.80	87.5%	141,700,900	87.50		Dinkes Provsu	
				90%		84%		87%		85.00%		85.00%						85.00%		97.70%		85.0%		94.44			
				60%		57%		58%		28.61%		29.42%						29.42%		50.72%		29.4%		49.03			
				70%		65%		67%		65.67%		65.62%						65.62%		97.94%		65.6%		93.74			

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Output : - Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan tindaklanjut penerbitan perizinan					1 Dokumen																			
	04.1.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF cabang dan Cabang PAK berbasis Elektronik	Outcome : - Persentase sarana Produksi kefarmasian yang dibina agar memenuhi Standard Cara Produksi yang baik Output : - Jumlah kabupaten/kota yang mampu dalam pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan cabang PAK berbasis elektronik	80%		65.62%		70%	86.508.500	56%		83.33%					83.33%		119%	0.00	83.33%		-	104.16		Dinkes Provsu	
Rata-rata capaian kinerja (%)				0				442,574,500.0		27,110,000.0		114,590,900.0		-		-		141,700,900		32.02		141,700,900					
Predikat kinerja																											
V									1,694,297,500				24,141,000				-	24,141,000				24,141,000					
1	05.1.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG Advokasi ,Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kab/kota yang melaksanakan advokasi, pemberdayaan, dan kemitraan dalam rangka peningkatan Germas					26 K/K	420,190,000				-				-		0.00%		26 K/K	-				Dinkes Provsu	
	05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan,Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Outcome : - Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Germas Output : - Jumlah kabupaten/Kota yang mampu dalam upaya peningkatan Germas	75%		60%		50%	420,190,000		69.69%						69.69%		139%	0.00	69.7%		-	92.92		Dinkes Provsu	
2	05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Prilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kab/kota yang melaksanakan program PHBS					33 K/K	860,889,000	0%				-				-		0.00%				-		Dinkes Provsu	
	05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Outcome : Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Output : Jumlah kabupaten/Kota yang mampu dalam penyelenggaraan promosi kesehatan dan PHBS	75%		n/a		70%	860,889,000		58.04%						58.04%		82.91%	0.00	58.0%		-	77.39		Dinkes Provsu	
3	05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pengembangan UKBM					33 K/K	413,218,500				24,141,000					-	24,141,000	0.00%			24,141,000			Dinkes Provsu	
	05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Outcome : - Persentase Posyandu Aktif - Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif Output :	90% 60%		57.23% 49.53%		75% 50%	413,218,500		57.15% 49.49%		24,141,000				57.15% 49.49%	24,141,000	76.20% 98.98%	5.84 49.49%	57.15% 49.49%	24,141,000	63.50 82.48		Dinkes Provsu		

No	Kode	Urusan Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Renstra OPD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD Provinsi)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Provinsi sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun Berjalan yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulanan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Provinsi Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Unit OPD Penanggung Jawab	Ket.							
							I		II		III		IV														
1	2	3	4	5 Rp		6 Rp		7 K Rp		8 K Rp		9 K Rp		10 K Rp		11 K Rp		12 = 8+9+10+11 K Rp		13 = 12/7 x 100% K Rp		14 = 6 + 12 K Rp		15 = 14/5 x 100% K Rp		16	17
			- Jumlah kabupaten/kota yang mampu dalam pengembangan UKBM			33 Lokasi																					
Rata-rata capaian kinerja (%)								1,694,297,500		-		24,141,000						24,141,000		1.42		24,141,000					
Predikat kinerja																											
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								572,550,826,226		33,145,621,979		198,611,758,660				-		231,757,380,639		40.48		231,757,380,639					
Predikat Kinerja																											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya anggaran yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan dan koordinasi yang baik antar unit kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Akibat pandemi Covid – 19, masih ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang pelaksanaannya tidak maksimal akibat Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Melaksanakan kegiatan rapat, koordinasi dan pembinaan dengan kabupaten/kota secara daring (media online/zoom meeting)																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD provinsi berikutnya*):																											

DISUSUN,
MEDAN, JULI 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,

drq. ISMAIL LUBIS, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA

DIEVALUASI
MEDAN, JULI 2022

PLT. KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dr. Ir. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670622 199303 1 011

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RKPA-BELANJA SKPD									
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022																			

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				551,804,051,294	12,683,890,762	0	0	564,487,942,056	589,915,937,882	16,429,424,944	0	0	606,345,362,826	41.857.420.770		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				171,081,445,849	8,187,898,867	0	0	179,269,344,716	208,375,499,994	9,487,684,467	0	0	217,863,184,461	38.593.839.745		
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1,019,047,559	0	0	0	1,019,047,559	1,106,887,559	0	0	0	1,106,887,559	87.840.000		
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			435,556,359	0	0	0	435,556,359	435,556,359	0	0	0	435,556,359	0		
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22,656,400	0	0	0	22,656,400	33,636,400	0	0	0	33,636,400	10.980.000		
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22,656,400	0	0	0	22,656,400	55,596,400	0	0	0	55,596,400	32.940.000		
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,178,800	0	0	0	17,178,800	28,158,800	0	0	0	28,158,800	10.980.000		
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,235,600	0	0	0	14,235,600	47,175,600	0	0	0	47,175,600	32.940.000		
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			46,668,000	0	0	0	46,668,000	46,668,000	0	0	0	46,668,000	0		
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			460,096,000	0	0	0	460,096,000	460,096,000	0	0	0	460,096,000	0		
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					129,814,201,000	0	0	0	129,814,201,000	163,434,376,000	0	0	0	163,434,376,000	33.620.175.000	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			127,007,078,000	0	0	0	127,007,078,000	160,600,063,000	0	0	0	160,600,063,000	33.592.985.000		
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			764,480,000	0	0	0	764,480,000	876,700,000	0	0	0	876,700,000	112.220.000		
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			91,920,000	0	0	0	91,920,000	91,920,000	0	0	0	91,920,000	0		
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			76,680,000	0	0	0	76,680,000	62,880,000	0	0	0	62,880,000	(13.800.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			93,780,000	0	0	0	93,780,000	93,780,000	0	0	0	93,780,000	0	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPT. Rumah Sakit Indrapura)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			83,160,000	0	0	0	83,160,000	55,440,000	0	0	0	55,440,000	(27.720.000)	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			130,680,000	0	0	0	130,680,000	100,800,000	0	0	0	100,800,000	(29.880.000)	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,194,460,000	0	0	0	1,194,460,000	1,180,830,000	0	0	0	1,180,830,000	(13.630.000)	
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			64,072,000	0	0	0	64,072,000	64,072,000	0	0	0	64,072,000	0	
1	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			23,930,000	0	0	0	23,930,000	23,930,000	0	0	0	23,930,000	0	
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,025,000	0	0	0	14,025,000	14,025,000	0	0	0	14,025,000	0	
1	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			124,186,000	0	0	0	124,186,000	124,186,000	0	0	0	124,186,000	0	
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			145,750,000	0	0	0	145,750,000	145,750,000	0	0	0	145,750,000	0	
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				322,260,000	0	0	0	322,260,000	322,260,000	0	0	0	322,260,000	0	
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,975,000	0	0	0	3,975,000	3,975,000	0	0	0	3,975,000	0	
1	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,250,000	0	0	0	20,250,000	20,250,000	0	0	0	20,250,000	0	
1	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			34,950,000	0	0	0	34,950,000	34,950,000	0	0	0	34,950,000	0	
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,585,000	0	0	0	18,585,000	18,585,000	0	0	0	18,585,000	0	
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			244,500,000	0	0	0	244,500,000	244,500,000	0	0	0	244,500,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				842,697,000	0	0	0	842,697,000	1,142,697,000	0	0	0	1,142,697,000	300.000.000	
1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			21,990,000	0	0	0	21,990,000	21,990,000	0	0	0	21,990,000	0	
1	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,380,000	0	0	0	40,380,000	40,380,000	0	0	0	40,380,000	0	
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45,600,000	0	0	0	45,600,000	45,600,000	0	0	0	45,600,000	0	
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			161,506,000	0	0	0	161,506,000	161,506,000	0	0	0	161,506,000	0	
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			519,401,000	0	0	0	519,401,000	819,401,000	0	0	0	819,401,000	300.000.000	
1	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			53,820,000	0	0	0	53,820,000	53,820,000	0	0	0	53,820,000	0	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				4,655,427,927	801,379,500	0	0	5,456,807,427	6,310,842,652	469,379,500	0	0	6,780,222,152	1.323.414.725	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			82,130,318	3,740,000	0	0	85,870,318	82,130,318	3,740,000	0	0	85,870,318	0	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60,860,190	0	0	0	60,860,190	60,860,190	0	0	0	60,860,190	0	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			67,915,670	0	0	0	67,915,670	71,740,670	0	0	0	71,740,670	3.825.000	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,837,260	0	0	0	49,837,260	49,837,260	0	0	0	49,837,260	0	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55,337,240	0	0	0	55,337,240	221,768,380	0	0	0	221,768,380	166.431.140	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			23,437,942	0	0	0	23,437,942	23,437,942	0	0	0	23,437,942	0	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT. Rumah Sakit Indrapura)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			56,366,300	0	0	0	56,366,300	56,366,300	0	0	0	56,366,300	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			63,341,500	0	0	0	63,341,500	63,341,500	0	0	0	63,341,500	0		
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,847,210	278,800,000	0	0	328,647,210	49,847,210	278,800,000	0	0	328,647,210	0		
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			74,774,187	0	0	0	74,774,187	74,774,187	0	0	0	74,774,187	0		
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			87,983,730	0	0	0	87,983,730	133,734,315	0	0	0	133,734,315	45,750.585		
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT. Rumah Sakit Indrapura)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			114,119,412	0	0	0	114,119,412	114,119,412	0	0	0	114,119,412	0		
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			103,289,054	0	0	0	103,289,054	103,289,054	0	0	0	103,289,054	0		
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			411,785,985	0	0	0	411,785,985	561,785,985	0	0	0	561,785,985	150.000.000		
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			106,557,305	0	0	0	106,557,305	106,557,305	0	0	0	106,557,305	0		
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			32,850,500	0	0	0	32,850,500	32,850,500	0	0	0	32,850,500	0		
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			114,323,569	0	0	0	114,323,569	114,323,569	0	0	0	114,323,569	0		
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90,493,170	0	0	0	90,493,170	90,493,170	0	0	0	90,493,170	0		
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			119,998,500	0	0	0	119,998,500	119,998,500	0	0	0	119,998,500	0		
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			67,896,344	70,839,500	0	0	138,735,844	67,896,344	38,839,500	0	0	106,735,844	(32.000.000)		
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT. Rumah Sakit Indrapura)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			180,528,700	0	0	0	180,528,700	180,528,700	0	0	0	180,528,700	0		
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			186,740,200	0	0	0	186,740,200	186,740,200	0	0	0	186,740,200	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			86,925,000	0	0	0	86,925,000	86,925,000	0	0	0	86,925,000	0	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			78,346,750	0	0	0	78,346,750	78,346,750	0	0	0	78,346,750	0	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			183,720,000	0	0	0	183,720,000	239,320,000	0	0	0	239,320,000	55.600.000	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT. Rumah Sakit Indrapura)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			166,723,800	0	0	0	166,723,800	166,723,800	0	0	0	166,723,800	0	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,297,500	0	0	0	50,297,500	50,297,500	0	0	0	50,297,500	0	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,310,000	0	0	0	120,310,000	320,310,000	0	0	0	320,310,000	200.000.000	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,030,000	0	0	0	15,030,000	10,030,000	0	0	0	10,030,000	(5.000.000)	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPT. Rumah Sakit Indrapura)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,200,000	0	0	0	16,200,000	16,200,000	0	0	0	16,200,000	0	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16,300,000	0	0	0	16,300,000	16,300,000	0	0	0	16,300,000	0	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			48,482,500	0	0	0	48,482,500	48,482,500	0	0	0	48,482,500	0	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,220,000	48,000,000	0	0	53,220,000	5,220,000	48,000,000	0	0	53,220,000	0	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,080,000	0	0	0	10,080,000	10,080,000	0	0	0	10,080,000	0	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14,400,000	0	0	0	14,400,000	14,400,000	0	0	0	14,400,000	0	
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			318,000,000	0	0	0	318,000,000	518,000,000	0	0	0	518,000,000	200.000.000	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			87,746,000	0	0	0	87,746,000	87,746,000	0	0	0	87,746,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT. Rumah Sakit Indrapura)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,700,000	0	0	0	35,700,000	35,700,000	0	0	0	35,700,000	0	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			64,026,000	0	0	0	64,026,000	64,026,000	0	0	0	64,026,000	0	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			85,946,000	0	0	0	85,946,000	85,946,000	0	0	0	85,946,000	0	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			925,834,091	0	0	0	925,834,091	1,725,834,091	0	0	0	1,725,834,091	800.000.000	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70,860,000	0	0	0	70,860,000	109,668,000	0	0	0	109,668,000	38.808.000	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			54,866,000	0	0	0	54,866,000	54,866,000	0	0	0	54,866,000	0	
1	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	400,000,000	0	0	400,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000	(300.000.000)	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,814,842,750	4,572,264,367	0	0	6,387,107,117	2,166,567,770	6,204,049,967	0	0	8,370,617,737	1.983.510.620	
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,240,000,000	2,600,000,000	0	0	3,840,000,000	1,240,000,000	3,300,000,000	0	0	4,540,000,000	700.000.000	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17,850,000	470,437,500	0	0	488,287,500	17,850,000	470,437,500	0	0	488,287,500	0	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	65,000,000	0	0	65,000,000	312,500	125,125,000	0	0	125,437,500	60.437.500	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			180,933,250	14,000,000	0	0	194,933,250	562,080,372	14,000,000	0	0	576,080,372	381.147.122	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	465,010,275	0	0	465,010,275	0	465,010,275	0	0	465,010,275	0	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	183,090,264	0	0	183,090,264	123,500	589,804,264	0	0	589,927,764	406.837.500	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	233,922,478	0	0	233,922,478	0	233,922,478	0	0	233,922,478	0	
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			136,707,000	358,983,850	0	0	495,690,850	109,188,898	823,930,450	0	0	933,119,348	437.428.498	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			239,352,500	181,820,000	0	0	421,172,500	237,012,500	181,820,000	0	0	418,832,500	(2.340.000)	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				18,780,107,100	0	0	0	18,780,107,100	19,036,429,000	0	0	0	19,036,429,000	256.321.900	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,150,000	0	0	0	2,150,000	2,150,000	0	0	0	2,150,000	0	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,525,000	0	0	0	6,525,000	4,750,000	0	0	0	4,750,000	(1.775.000)	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT. Rumah Sakit Indrapura)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			29,600,000	0	0	0	29,600,000	29,600,000	0	0	0	29,600,000	0	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,710,000	0	0	0	2,710,000	2,710,000	0	0	0	2,710,000	0	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			310,000,000	0	0	0	310,000,000	310,000,000	0	0	0	310,000,000	0	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			380,000,000	0	0	0	380,000,000	580,000,000	0	0	0	580,000,000	200.000.000	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,850,000,000	0	0	0	1,850,000,000	1,850,000,000	0	0	0	1,850,000,000	0	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			644,138,500	0	0	0	644,138,500	745,000,000	0	0	0	745,000,000	100.861.500	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			120,000,000	0	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0	0	120,000,000	0	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT. Rumah Sakit Indrapura)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			135,000,000	0	0	0	135,000,000	135,000,000	0	0	0	135,000,000	0	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			600,000,000	0	0	0	600,000,000	500,000,000	0	0	0	500,000,000	(100.000.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,323,270,900	0	0	0	1,323,270,900	1,323,270,900	0	0	0	1,323,270,900	0	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,003,820,900	0	0	0	1,003,820,900	1,021,820,900	0	0	0	1,021,820,900	18.000.000	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT. Rumah Sakit Indrapura)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,143,977,800	0	0	0	1,143,977,800	575,575,000	0	0	0	575,575,000	(568.402.800)	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,699,421,000	0	0	0	1,699,421,000	1,744,421,000	0	0	0	1,744,421,000	45.000.000	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,640,378,000	0	0	0	1,640,378,000	1,700,378,000	0	0	0	1,700,378,000	60.000.000	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,234,759,800	0	0	0	1,234,759,800	1,255,759,800	0	0	0	1,255,759,800	21.000.000	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6,650,755,200	0	0	0	6,650,755,200	7,132,393,400	0	0	0	7,132,393,400	481.638.200	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				13,832,862,513	2,814,255,000	0	0	16,647,117,513	14,855,440,013	2,814,255,000	0	0	17,669,695,013	1.022.577.500	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,214,420,000	0	0	0	1,214,420,000	583,420,000	0	0	0	583,420,000	(631.000.000)	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			66,940,000	0	0	0	66,940,000	66,940,000	0	0	0	66,940,000	0	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT. Rumah Sakit Indrapura)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,410,000	0	0	0	100,410,000	100,410,000	0	0	0	100,410,000	0	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			90,296,000	0	0	0	90,296,000	86,596,000	0	0	0	86,596,000	(3.700.000)	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			66,940,000	0	0	0	66,940,000	66,940,000	0	0	0	66,940,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,410,000	0	0	0	100,410,000	100,410,000	0	0	0	100,410,000	0	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			971,630,000	0	0	0	971,630,000	1,271,610,000	0	0	0	1,271,610,000	299.980.000	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			66,940,000	0	0	0	66,940,000	66,940,000	0	0	0	66,940,000	0	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			84,700,000	0	0	0	84,700,000	69,700,000	0	0	0	69,700,000	(15.000.000)	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54,200,000	0	0	0	54,200,000	49,700,000	0	0	0	49,700,000	(4.500.000)	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			185,000,000	0	0	0	185,000,000	185,000,000	0	0	0	185,000,000	0	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			425,450,000	0	0	0	425,450,000	1,225,450,000	0	0	0	1,225,450,000	800.000.000	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			114,250,000	0	0	0	114,250,000	114,250,000	0	0	0	114,250,000	0	
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,092,025,000	2,183,760,000	0	0	12,275,785,000	10,400,822,500	2,183,760,000	0	0	12,584,582,500	308.797.500	
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			114,001,513	630,495,000	0	0	744,496,513	382,001,513	630,495,000	0	0	1,012,496,513	268.000.000	
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			85,250,000	0	0	0	85,250,000	85,250,000	0	0	0	85,250,000	0	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				357,411,129,995	4,495,991,895	0	0	361,907,121,890	360,849,532,823	6,941,740,477	0	0	367,791,273,300	5.884.151.410	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				30,976,025,225	3,873,266,719	0	0	34,849,291,944	31,975,764,772	4,023,266,719	0	0	35,999,031,491	1.149.739.547	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7,914,847,569	0	0	0	7,914,847,569	7,914,847,569	0	0	0	7,914,847,569	0	
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			210,055,664	0	0	0	210,055,664	274,188,064	0	0	0	274,188,064	64.132.400	
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			328,156,101	0	0	0	328,156,101	372,499,502	0	0	0	372,499,502	44.343.401	
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			338,226,346	0	0	0	338,226,346	380,280,424	0	0	0	380,280,424	42.054.078	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	185,112,718	0	0	185,112,718	0	185,112,718	0	0	185,112,718	0	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	288,775,925	0	0	288,775,925	30,150,000	288,775,925	0	0	318,925,925	30.150.000	
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8,700,000	0	0	0	8,700,000	0	0	0	0	0	(8.700.000)	
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			27,550,000	0	0	0	27,550,000	27,550,000	0	0	0	27,550,000	0	
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan (UPT. Laboratorium Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			766,056,251	3,399,378,076	0	0	4,165,434,327	1,593,815,919	3,399,378,076	0	0	4,993,193,995	827.759.668	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150,000,000	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			404,605,000	0	0	0	404,605,000	404,605,000	0	0	0	404,605,000	0	
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20,827,828,294	0	0	0	20,827,828,294	20,827,828,294	150,000,000	0	0	20,977,828,294	150.000.000	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				323,865,615,770	622,725,176	0	0	324,488,340,946	326,355,501,751	2,918,473,758	0	0	329,273,975,509	4.785.634.563	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,299,451,800	220,500,000	0	0	2,519,951,800	1,626,057,800	220,500,000	0	0	1,846,557,800	(673.394.000)	
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			50,286,184,475	104,113,938	0	0	50,390,298,413	51,175,786,425	2,399,862,520	0	0	53,575,648,945	3.185.350.532	
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Dinas Kesehatan)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			2,095,557,400	0	0	0	2,095,557,400	1,852,104,000	0	0	0	1,852,104,000	(243.453.400)	
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			459,847,000	0	0	0	459,847,000	459,847,000	0	0	0	459,847,000	0	
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			427,972,650	0	0	0	427,972,650	427,972,650	0	0	0	427,972,650	0	
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			37,003,722,700	0	0	0	37,003,722,700	37,003,722,700	0	0	0	37,003,722,700	0	
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			952,513,711	238,052,354	0	0	1,190,566,065	881,015,711	238,052,354	0	0	1,119,068,065	(71.498.000)	
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dinas Kesehatan)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			1,173,635,000	0	0	0	1,173,635,000	1,173,635,000	0	0	0	1,173,635,000	0	
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			583,851,000	0	0	0	583,851,000	583,851,000	0	0	0	583,851,000	0	
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			224,660,000	0	0	0	224,660,000	224,660,000	0	0	0	224,660,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,178,948,600	0	0	0	2,178,948,600	2,478,948,600	0	0	0	2,478,948,600	300.000.000	
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,170,000	0	0	0	100,170,000	67,202,000	0	0	0	67,202,000	(32.968.000)	
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			485,815,000	0	0	0	485,815,000	485,815,000	0	0	0	485,815,000	0	
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			207,049,000	0	0	0	207,049,000	207,049,000	0	0	0	207,049,000	0	
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	Pajak Rokok - Pembayaran Iuran JKN			206,951,112,800	0	0	0	206,951,112,800	206,951,112,800	0	0	0	206,951,112,800	0	
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan			186,213,000	0	0	0	186,213,000	185,613,000	0	0	0	185,613,000	(600.000)	
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			335,903,000	0	0	0	335,903,000	449,957,000	0	0	0	449,957,000	114.054.000	
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			494,997,000	0	0	0	494,997,000	239,592,000	0	0	0	239,592,000	(255.405.000)	
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			123,213,700	0	0	0	123,213,700	123,213,700	0	0	0	123,213,700	0	
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			105,608,000	0	0	0	105,608,000	102,008,000	0	0	0	102,008,000	(3.600.000)	
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan			4,728,397,438	34,906,084	0	0	4,763,303,522	5,339,541,051	34,906,084	0	0	5,374,447,135	611.143.613	
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (UPT. Rumah Sakit Khusus Mata)	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan			3,355,565,529	0	0	0	3,355,565,529	4,358,901,834	0	0	0	4,358,901,834	1.003.336.305	
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (UPT. Rumah Sakit Kusta Lausimomo)	Pajak Rokok - Pelayanan Kesehatan			2,377,087,360	25,152,800	0	0	2,402,240,160	3,878,094,123	25,152,800	0	0	3,903,246,923	1.501.006.763	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,967,571,000	0	0	0	3,967,571,000	3,667,571,000	0	0	0	3,667,571,000	(300.000.000)	
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38,780,000	0	0	0	38,780,000	38,780,000	0	0	0	38,780,000	0	
1	02	02	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			600,417,000	0	0	0	600,417,000	600,417,000	0	0	0	600,417,000	0	
1	02	02	1.02	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,121,371,607	0	0	0	2,121,371,607	1,517,628,357	0	0	0	1,517,628,357	(603.743.250)	
1	02	02	1.02	30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (Dinas Kesehatan)	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			0	0	0	0	0	255,405,000	0	0	0	255,405,000	255.405.000	
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				965,540,400	0	0	0	965,540,400	1,172,184,500	0	0	0	1,172,184,500	206.644.100	
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			430,415,000	0	0	0	430,415,000	430,415,000	0	0	0	430,415,000	0	
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			382,297,400	0	0	0	382,297,400	588,941,500	0	0	0	588,941,500	206.644.100	
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (UPT. Rumah Sakit Khusus Paru)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			152,828,000	0	0	0	152,828,000	152,828,000	0	0	0	152,828,000	0	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				1,603,948,600	0	0	0	1,603,948,600	1,346,081,800	0	0	0	1,346,081,800	(257.866.800)	
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			422,964,000	0	0	0	422,964,000	227,412,000	0	0	0	227,412,000	(195.552.000)	
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			634,683,600	0	0	0	634,683,600	572,368,800	0	0	0	572,368,800	(62.314.800)	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			546,301,000	0	0	0	546,301,000	546,301,000	0	0	0	546,301,000	0	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				21,174,603,450	0	0	0	21,174,603,450	17,875,785,450	0	0	0	17,875,785,450	(3.298.818.000)	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				19,137,225,000	0	0	0	19,137,225,000	15,968,384,000	0	0	0	15,968,384,000	(3.168.841.000)	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18,864,991,000	0	0	0	18,864,991,000	15,696,150,000	0	0	0	15,696,150,000	(3.168.841.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			272,234,000	0	0	0	272,234,000	272,234,000	0	0	0	272,234,000	0	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				2,037,378,450	0	0	0	2,037,378,450	1,907,401,450	0	0	0	1,907,401,450	(129.977.000)	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (UPT. Pelatihan Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			995,952,950	0	0	0	995,952,950	865,975,950	0	0	0	865,975,950	(129.977.000)	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			688,132,500	0	0	0	688,132,500	688,132,500	0	0	0	688,132,500	0	
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			353,293,000	0	0	0	353,293,000	353,293,000	0	0	0	353,293,000	0	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				442,574,500	0	0	0	442,574,500	442,574,500	0	0	0	442,574,500	0	
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				442,574,500	0	0	0	442,574,500	442,574,500	0	0	0	442,574,500	0	
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			356,066,000	0	0	0	356,066,000	356,066,000	0	0	0	356,066,000	0	
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			86,508,500	0	0	0	86,508,500	86,508,500	0	0	0	86,508,500	0	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				1,694,297,500	0	0	0	1,694,297,500	2,372,545,115	0	0	0	2,372,545,115	678.247.615	
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				420,190,000	0	0	0	420,190,000	483,736,917	0	0	0	483,736,917	63.546.917	
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			420,190,000	0	0	0	420,190,000	483,736,917	0	0	0	483,736,917	63.546.917	
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi				860,889,000	0	0	0	860,889,000	1,475,589,698	0	0	0	1,475,589,698	614.700.698	
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			860,889,000	0	0	0	860,889,000	1,475,589,698	0	0	0	1,475,589,698	614.700.698	
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi				413,218,500	0	0	0	413,218,500	413,218,500	0	0	0	413,218,500	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM (Dinas Kesehatan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			413,218,500	0	0	0	413,218,500	413,218,500	0	0	0	413,218,500	0	



DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

**JL. Prof. HM Yamin, SH No. 41AA Medan
Telp. (061) 4524550 – 4535320
20234
Email : dinkes@sumutprov.go.id**